

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN  
DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 41 TAHUN 2022 DAN *FIQH BĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh:

Desi Fitriani

NIM: 200203110045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN  
DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 41 TAHUN 2022 DAN *FIQH BĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh:

Desi Fitriani

NIM: 200203110045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
DALAM PELESTARIAN DESTINASI WISATA BUDAYA  
MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2022  
DAN *FIQH BI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis,



Desi Fitriani

NIM 200203110045

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Desi Fitriani NIM 200203110045 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM  
PELESTARIAN DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN  
BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2022 DAN *FIQH BI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 29 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H  
NIP. 197903132023211009

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Desi Fitriani NIM 200203110045 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2022 DAN *FIQH BI'AH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan nilai (A)

Dengan Penguji

1. NUR JANNANI, S.HI., M.H.

NIP. 198110082015032002

2. TEGUH SETYOBUDI, S.HI., M.H.

NIP. 197903132023211009

3. Dr. MUSLEH HARRY, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 29 Februari 2024



Dr. Sudirman, MA, CAHRM.  
NIP. 197708222005011008

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

(QS. Al-Anbiya` (21) : 107)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya Menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Dan Fiqh Bī’ah”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang di kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, aamiin.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
5. Teguh Setyobudi , S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitianpenulis
7. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantudalam penyelesaian penulisan skripsi
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan
9. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan pengorbananya disetiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada skripsi
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu maupun mendoakan penulis selama proses awal hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 05 Februari 2024

Penulis

Desi Fitriani

NIM 200203110045

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

### B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

## E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu' 'ima*  
عُدُّوْا : *aduwwu'*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## G. KATA SANDING

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru*

*Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
1. Manfaat Teoritis.....	17
2. Manfaat Praktis .....	17
F. Definisi Operasional .....	18
1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	18
2. Destinasi Wisata Budaya .....	19
3. <i>Fiqh Bī'ah</i> .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Penelitian Terdahulu .....	24
B. Kajian Pustaka .....	36
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	37

2. <i>Fiqh Bī'ah</i> .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Metode Penentuan Subjek.....	51
E. Sumber Data.....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri .....	58
B. Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya .....	67
C. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif <i>Fiqh Bī'ah</i> .....	87
BAB V PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

## ABSTRAK

Fitriani, Desi. 200203110045, 2024. **Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya Menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 dan *Fiqh Bī'ah***. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Destinasi Wisata Budaya; *Fiqh Bī'ah*.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dihadapkan pada tantangan dalam mengelola sektor pariwisata. Di era disrupsi tantangan pelestarian budaya dalam menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan lokal memiliki peran krusial. Kebudayaan memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Dalam skripsi ini mengkaji implementasi pemasaran pariwisata menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 dan *Fiqh Bī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Sumber data, yaitu data primer, dan data sekunder. Data diperoleh dari informan melalui wawancara, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini 1) Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri masih belum optimal. 2) Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri perspektif *Fiqh Bī'ah* sudah sesuai dengan perspektif *Fiqh Bī'ah* Ali Yafie, namun terdapat keterputusan koordinasi antara bidang pemasaran dan bidang pengembangan pariwisata.

## ABSTRACT

Fitriani, Desi. 200203110045, 2024. **The Role of The Department of Tourism and Culture in Preservation of Cultural Tourism Destinations According to Kediri Regent Regulation Number 41 of 2022 and *Fiqh Bī'ah***. Constitutional Law (Siyasah) Thesis, Faculty of Syaria. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** Department Tourism and Culture; Cultural Tourism Destination; Fiqh Bī'ah.

The Department of Tourism and Culture faced with challenges in managing the tourism sector. In the era of disruption, the challenge of cultural preservation in maintaining, preserving and promoting local culture has a crucial role. Culture has great potential if integrated with the tourism sector. This thesis examines the implementation of tourism marketing according to Kediri Regent Regulation Number 41 of 2022 and *Fiqh Bī'ah*.

This research used empirical juridical research methods with a sociological juridical approach. The research location is at the Kediri Regency Tourism and Culture Office. Data sources, namely primary data and secondary data. Data was obtained from informants through interviews, and data analysis used a qualitative approach.

The results of this research were: 1) The function of Department of Tourism and Culture in the field of tourism marketing in preserving cultural tourism destinations in Kediri Regency is still not optimal. 2) The function of Department of Tourism and Culture in the field of tourism marketing in preservation cultural tourism destinations in Kediri Regency the *Fiqh Bī'ah* perspective was in accordance with Ali Yafie's *Fiqh Bī'ah* perspective, however there was a disconnection in coordination between the marketing sector and the tourism development sector.

## ملخص البحث

فيترياني، ديسي. ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٤٥. دور مكتب السياحة والثقافة في المحافظة على الوجهات السياحية الثقافية وفقا لنظام الوصي على الكرسي كديري رقم ٤١ لعام ٢٠٢٢ وفقه البيئة. البحث العلمي. قسم القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيجوه سيتوبودي، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية: مكتب السياحة والثقافة، وجهات السياحة الثقافية، فقه البيئة.**

تواجه مكتب السياحة والثقافة تحديات في إدارة قطاع السياحة. في عصر الاضطراب، يلعب التحدي المتمثل في الحفاظ على الثقافة في الحفاظ على الثقافة المحلية والحفاظ عليها وتعزيزها دورا حاسما. الثقافة لديها إمكانات كبيرة إذا تم دمجها مع قطاع السياحة. يبحث هذا البحث العلمي في تنفيذ التسويق السياحي وفقا لنظام الوصي على الكرسي كديري رقم ٤١ لعام ٢٠٢٢ وفقه البيئة.

استخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني التجريبي مع منهج قانوني الاحتماعي. ميدان البحث في مكتب السياحة والثقافة في منطقة كديري. مصادر البيانات، وهي البيانات الأساسية، والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات من المخبرين من خلال المقابلات، واستخدم تحليل البيانات نهجا نوعيا.

أظهرت نتائج هذا البحث أن (١) لا تزال وظيفة مكتب السياحة والثقافة في مجال التسويق السياحي في الحفاظ على الوجهات السياحية الثقافية في منطقة كديري غير مثالية. (٢) إن وظيفة مكتب السياحة والثقافة في مجال التسويق السياحي في الحفاظ على الوجهات السياحية الثقافية في منطقة كديري من منظور الفقه البيئي هي وفقا منطور الفقه البيئي لعلّي يافعي، إلا أن هناك انفصالا في التنسيق بين مجال التسويق ومجال التنمية السياحية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan segala keunikan dan keragaman budaya, alam, dan tradisi yang dimilikinya, harus menjadikan prinsip kebhinekaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun, penting juga untuk tetap memperhitungkan jumlah penduduk dalam perencanaan dan pembangunan sektor pariwisata, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara melestarikan warisan budaya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena jumlah penduduk memegang peranan penting sebagai salah satu modal dalam pembangunan sektor pariwisata. Jumlah penduduk memiliki fungsi ganda yang krusial, baik untuk keadaan saat ini maupun masa depan. Jumlah penduduk berperan sebagai sumber potensial wisatawan nusantara, yang dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor pariwisata dalam negeri. Dengan memahami dan mengelola potensi ini dapat memaksimalkan manfaat dari jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan kepariwisataan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Desi Permatasari P, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran," *Moderat 4* (2018).

Undang-Undang mengenai kepariwisataan diatur lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.<sup>2</sup> Dalam Pasal 5 huruf a menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan pariwisata bahwasanya: "menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan". Selain itu, prinsip penyelenggaraan pariwisata diatur pada huruf d, bahwa dalam mengelola pariwisata juga harus "memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup."

Kunjungan wisata dan ekonomi kreatif dapat diberdayakan melalui perkembangan budaya. Lebih lanjut, kebudayaan memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Namun sektor kebudayaan memerlukan dukungan yang kuat karena tidak dapat berdiri sendiri. Beberapa faktor penunjang yang penting termasuk promosi aktif mengenai kebudayaan, serta penyediaan fasilitas seperti akomodasi dan transportasi yang memudahkan kunjungan wisatawan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sektor kebudayaan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 , Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 59 Halaman.

<sup>3</sup>Syifa Fauzia Rohman, Dadan Kurniansyah, and Rachmat Ramdani, "Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Kampung Budaya Di Kabupaten Karawang," *Moderat* 7, no. November (2021).

Seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam mempromosikan pariwisata menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, dan untuk kegiatan di daerah-daerah dibantu oleh Dinas Pariwisata masing-masing daerah. Dengan demikian, masing-masing pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengembangkan pariwisatanya.<sup>4</sup> Sebagai bagian integral dari struktur organisasi administrasi negara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran strategis dalam mengelola sector pariwisata dan kebudayaan.

Indonesia dikenal oleh masyarakat luas menjadi negara yang mempunyai bermacam-macam suku dan budaya, tidak heran banyak wisatawan asing maupun domestik yang gencar berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan sangat penting dalam mensosialisasikan potensi wisata dan budaya. Akan tetapi, peran masyarakat khususnya pelaku budaya juga tidak kalah penting dalam memaksimalkan potensi budaya di daerah masing-masing. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata dan budaya akan menjadi langkah yang baik dalam upaya pengembangan dan menyosialisasikan potensi wisata dan budaya secara

---

<sup>4</sup>Yugih Setyanto and Septia Winduwati, "Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi Pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1077>.

maksimal guna menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>5</sup>

Dalam jangka panjang, bidang kebudayaan tampaknya akan lebih mendominasi motivasi wisatawan. Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia juga membawa implikasi terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia termasuk perkembangan bahasa Indonesia sebagai sarana pengungkapan kebudayaan Indonesia. Adanya dampak positif pariwisata terhadap kebudayaan menunjukkan adanya keselarasan ungkapan yang mengatakan "pariwisata untuk kebudayaan", berarti, pengembangan pariwisata benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan kebudayaan dalam arti luas.<sup>6</sup> Sehingga perkembangan pariwisata memiliki peran penting dalam memperkuat kebudayaan Indonesia.

Peran dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>7</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Mohammad Insan Romadhan, Anggraeny Puspaningtyas, and Dida Rahmadanik, "Proses Komunikasi Dalam Pelestarian Budaya Saronen Kepada Generasi Muda," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan* 20, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31346/jpikom.v20i1.1650>.

<sup>6</sup>Gradila Apriani, "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pelestarian Budaya Dan Pengembangan Pariwisata," *Fokus* 1, no. 15 (2017).

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991).

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran tidak hanya merupakan sekadar tugas atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang dalam suatu jabatan, tetapi mencakup suatu rangkaian perilaku khusus yang timbul sebagai respons terhadap ekspektasi yang melekat pada posisi tersebut. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>9</sup>

Peran merupakan suatu tanggung jawab dimiliki oleh seorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.<sup>10</sup> Suatu peran sangat erat kaitannya dengan pemenuhan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang. Peran seseorang menentukan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya, serta tugas yang melekat pada peran tersebut. Oleh karena itu, tugas yang terkait dengan peran harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran krusial dalam menjaga dan melestarikan budaya. Peran ini melibatkan berbagai upaya

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

<sup>9</sup>Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (n.d.).

<sup>10</sup>Fitriana, Yusuf Adam Hilman, and Bambang Triono, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>.

mulai dari pengumpulan, dokumentasi, pemeliharaan, hingga promosi warisan budaya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya suatu Negara. Upaya ini tidak hanya memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup, tetapi juga berkontribusi pada identitas dan keberagaman budaya global. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri memiliki tugas dan fungsi yang luas, dengan tugas dan fungsi yang mencakup berbagai aspek penting di sektor pariwisata dan kebudayaan. Fokus utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri terbagi dalam empat bidang utama, yakni pemasaran pariwisata, pengembangan pariwisata, kesenian, dan sejarah serta purbakala.<sup>11</sup>

Kebudayaan memiliki arti luas berupa hasil cipta karsa dan karya manusia. Kebudayaan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan perubahan zaman. Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Dampak positif pariwisata terhadap kebudayaan menunjukkan bahwa konsep “pariwisata untuk kebudayaan” memiliki keselarasan yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata secara efektif memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap perkembangan budaya dalam arti pengembangan pariwisata yang tepat

---

<sup>11</sup>Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri

dapat memperkuat dan memelihara keberagaman budaya Indonesia.<sup>12</sup> Penurunan destinasi wisata budaya menunjukkan bahwa pemasaran pariwisata memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan pengelolaan pariwisata yang berfokus pada pelestarian budaya.<sup>13</sup> Pemasaran pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022, terutama dijelaskan dalam Pasal 7.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan peraturan yang lebih spesifik terkait objek budaya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, dijelaskan dengan rinci mengenai tujuan pemajuan budaya bahwasanya: “Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk memajukan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah pembangunan peradaban dunia”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Apriani, “Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pelestarian Budaya Dan Pengembangan Pariwisata.”

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Jumlah Objek Wisata Di Kabupaten Kediri Menurut Jenisnya Dan Kecamatan 2020-2022,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, n.d.

<sup>14</sup>Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055 , Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 57 Halaman.

Perkembangan zaman menjadikan nilai-nilai kebudayaan lokal seringkali terpapar oleh pengaruh modernisasi. Hal ini mengakibatkan penurunan minat dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat. Penting untuk memahami bahwa budaya lokal bukan hanya cerminan sejarah suatu daerah, tetapi juga menjadi pondasi bagi nilai-nilai sosial, norma, bahasa, serta cara hidup yang unik. Pelestarian budaya merupakan suatu langkah penting, tidak hanya melibatkan pelestarian benda-benda bersejarah dan tradisi-tradisi, tetapi juga melibatkan pengajaran dan pemahaman tentang warisan budaya kepada generasi muda.<sup>16</sup>

Nilai-nilai budaya yang berakar pada kearifan lokal dan tradisi suku-suku bangsa seringkali terpapar oleh pengaruh budaya asing dalam era disrupsi. Masyarakat seringkali cenderung mengabaikan warisan budaya lokal. Dalam menghadapi tantangan era disrupsi ini, penting untuk mengembangkan strategi yang memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan elemen-elemen budaya asing yang masuk. Gejala sosial ini mendesak bagi para pemangku kebijakan untuk mengubah arah kebijakan mereka dalam pengelolaan sumber daya budaya. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai pemangku kebudayaan di masa depan, dan mereka

---

<sup>16</sup>Syahriwana, Sri Nurwalyuni, and Jayadi Nas, "Hubungan Budaya Lokal Dalam Pelayanan Pemerintahan Di Kabupaten Tana Toraja," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2014).

dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keragaman sumber daya kebudayaan dengan bijak.<sup>17</sup>

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Aktualisasi budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada kenyataannya masih belum berjalan baik. Hal ini bisa terlihat dari semakin maraknya penggunaan bahasa asing, gaya berpakaian tidak sesuai tradisi, dan kurangnya minat pada kebudayaan lokal. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan budaya sangat *urgent* mengingat era disrupsi dan modernisasi yang semakin kuat kian mengikis berbagai ciri khas dan kepribadian bangsa. Pemasaran juga diperlukan agar masyarakat semakin mencintai dan mengapresiasi kebudayaan lokal. Pemasaran pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022, terutama dijelaskan dalam Pasal 7.<sup>18</sup>

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dikemukakan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 tahun 2022 tidak hanya menjadi hasil dari inisiasi dalam kerangka regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah Kediri

---

<sup>17</sup>Reny Triwardani and Christina Rochayanti, "Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal," *Reformasi* 4, no. 2 (2014).

<sup>18</sup>Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri

Nomor 5 tahun 2022, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara nasional. Dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan UUD 1945, peraturan tersebut didesain untuk mendorong penguatan sistem pemerintahan demokrasi, memastikan partisipasi publik, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masa lalu. Masalahnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokal untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri

<sup>20</sup> Lubis Hermanto, Ariani Rosadi, and Muhsninin, "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Di Kota Bima," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2019).

Hingga detik ini sampah masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan indah. Namun masih saja ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang dengan seenaknya membuang sampah sembarangan, sehingga mencemari lingkungan dan merusak keindahan kota. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, bahwa "Kami melibatkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tujuannya adalah agar dapat menumbuhkan budaya bersih, budaya malu membuang sampah sembarangan dan membudayakan pola hidup minim sampah". Sesuai dengan tagline 'Kediri Berbudaya dan tema' yang diusung dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219 tahun 2023 'yaitu Sahitya Adhikara Budhaya' yang artinya sinergi membangun Kediri berbudaya.<sup>21</sup>

Kediri memiliki sejarah yang kaya sebagai ibu peradaban di Indonesia, sehingga *tagline* "Kediri Berbudaya" adalah cara yang sangat tepat untuk menggambarkan potensi unik dan kondisi luar biasa yang dimiliki oleh kabupaten Kediri. Dengan mengusung tema "Sahitya Adhikara Budhaya," pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa Kabupaten Kediri tidak hanya kaya akan keberagaman budaya, tetapi juga memegang kekayaan tersebut sebagai suatu warisan yang amat berharga. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito sangat berharap bahwa *tagline* "Kediri Berbudaya" akan memberikan penekanan pada pentingnya sinergi

---

<sup>21</sup> Dinas Kominfo Kab. Kediri, "Grebek Sampah, Tanamkan Budaya Hidup Bersih," [berita.kedirikab.go.id](https://berita.kedirikab.go.id), 2023, <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/03/grebek-sampah-tanamkan-budaya-hidup-bersih>.

dalam upaya membangun Kediri yang lebih mendalam dalam aspek budaya. Dengan demikian, budaya lokal dapat menjadi pondasi yang kuat untuk perkembangan dan identitas kabupaten Kediri di masa depan.<sup>22</sup>

Pada ajang penghargaan pariwisata tertinggi di Jawa Timur, Kabupaten Kediri untuk event “*East Java Tourism Award 2023*” memperoleh tiga penghargaan yaitu Monumen Simpang Lima Gumul sebagai kategori daya tarik wisata buatan, Goa Jegles Dewata Keling sebagai nominator kategori daya tarik wisata alam dan yang terakhir adalah Situs Ndalem Pojok sebagai nominator kategori daya tarik wisata budaya.<sup>23</sup> Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada perolehan tiga penghargaan oleh Kabupaten Kediri dalam “*East Java Tourism Award 2023*”. Hal ini menjadi landasan utama untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi potensi serta keunggulan pariwisata di Kabupaten Kediri.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>24</sup> Lingkungan menurut Otto Soemarwoto dalam buku “*Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*” menjelaskan lingkungan adalah ruang yang menempati

---

<sup>22</sup>Canda Adisurya, “Bupati Kediri Ajak Berbudaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk Selaraskan Tagline Kediri Berbudaya,” *Times Indonesia*, 2023.

<sup>23</sup>Dinas Kominfo Kab. Kediri, “Simpang Lima Gumul Raih Penghargaan East Java Tourism Award (EJTA) 2023 Kategori Daya Tarik Wisata Buatan,” *Seputar Kediri*, 2023, <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/10/simpang-lima-gumul-raih-penghargaan-east-java-tourism-award-ejta-2023-kategori-daya-tarik-wisata-buatan#:~:text=Kabupaten Kediri sendiri untuk East,Pojok sebagai nominator kategori daya>.

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 71 Halaman.

suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya yang menempati ruang tertentu. Sedangkan dalam Kamus Ekologi lingkungan yaitu bagian dari keseluruhan yang berhubungan satu sama lain. Selain itu lingkungan juga berkaitan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Keseluruhan tersebut berada secara alami di bumi dan daerah-daerah lainnya.<sup>25</sup>

Lingkungan berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alami secara dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alami terdiri dari atas sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada baik itu komponen fisik maupun biologis. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jenis lingkungan yang dibuat oleh manusia ditujukan untuk memenuhi manfaat yang sangat baik bagi manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya.<sup>26</sup>

*Fiqh* selain sebagai norma yang berfungsi sebagai seperangkat alat kontrol sosial, *fiqh* juga berperan sebagai alat rekayasa sosial yang peduli terhadap aspek lingkungan. *Fiqh* lingkungan merupakan salah satu pendekatan yang dapat memberikan bantuan normatif kepada masyarakat

---

<sup>25</sup> Lindungi Hutan, "Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat," 2022, accessed February 27, 2024, <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>.

<sup>26</sup> Hutan.

yang memiliki dimensi moral-etik, maka *fiqh* lingkungan akan menjadi *problem solving* atas fenomena krisis lingkungan. Lebih dari itu, *fiqh* diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka menanggulangi krisis lingkungan yang sedang menjadi diskursus dunia global. *Fiqh* memiliki kelebihan yang dapat diandalkan, yaitu karakteristiknya menjadi jembatan penghubung antara aspek etis dan yuridis.<sup>27</sup>

Pariwisata dapat sejalan dengan prinsip *Fiqh Bi'ah* dimana ada beberapa aspek yang diangkat dalam pariwisata diantaranya: melindungi lingkungan alam dan budaya setempat, meminimalisir dampak buruk dalam pembangunannya, memiliki penanganan limbah, menggunakan energi yang ramah lingkungan, membuka peluang bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan penduduk lokal, berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan lain-lain. Sebagai *khalifah fil ard* tentu sudah menjadi kewajiban untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar demi kemaslahatan bersama.<sup>28</sup>

Semua ini merupakan program yang sudah selaras dengan pandangan Islam tentang lingkungan. Dimana Islam telah terbukti sangat peduli akan proses kelestarian lingkungan serta berlaku tegas atas setiap pelanggaran yang akan merugikan orang banyak.<sup>29</sup> Pelestarian lingkungan dalam perspektif agama pun tidak luput yang ditandai dengan banyaknya

---

<sup>27</sup>Moh Mufid, "Fikih Ekowisata Berbasis Maqasid Syariah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove Di Wonorejo Kota Surabaya," *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>.

<sup>28</sup>Salma Asyrafah, "Ekowisata: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Biah," Suara Muhammadiyah, 2021.

<sup>29</sup>Ahsin Sakho Muhammad et al., *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* (Jakarta: Konvergensi International Indonesia, 2006).

ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang berbentuk perintah secara langsung, peringatan, maupun kisah yang berbicara masalah pelestarian lingkungan.<sup>30</sup> Hal tersebut diharapkan agar terus mengembangkan tradisi-tradisi Islam dengan program-program yang mengarahkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat kita ketahui bahwa antara pelestarian destinasi wisata budaya selaras dengan prinsip *Fiqh Bī'ah*. Kepariwisataaan bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Dengan memahami prinsip-prinsip *Fiqh Bī'ah*, penerapan kebijakan pariwisata dan kebudayaan dapat lebih selaras dengan nilai-nilai Islam, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai. "PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PELESTARIAN DESTINASI WISATA BUDAYA MENURUT PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2022 DAN *FIQH BĪ'AH*".

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kajian masalah yang luas maka peneliti membatasi kajian pada pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menuju pelestarian destinasi wisata budaya berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 terkait dengan pemenuhan

---

<sup>30</sup>Akmaluddin, "Konvergensi Ekolinguistik dan Fiqh Bī'ah Dalam Pelestarian Lingkungan," *El-Tsaqofah (Jurnal Jurusan PBA)*, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20414/tsaqofah.v19i2.2623>.

fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata Pasal 7 Ayat (2) dan *Fiqh Bī'ah*. Untuk mendalami pemahaman terhadap upaya pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri lokasi penelitian dibatasi pada tiga wisata yaitu Monumen Simpang Lima Gumul, Goa Jegles Dewata Keling, dan Situs Ndalem Pojok.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata terhadap implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri perspektif *Fiqh Bī'ah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa dan mendeskripsikan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata terhadap implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri.
2. Menganalisa fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri perspektif *Fiqh Bī'ah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, harapan peneliti hasil yang didapatkan dalam penelitian memberikan manfaat dan kegunaan secara akademik dan praktis yang bermanfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan khasanah keilmuan dan informasi kepada pembaca mengenai destinasi wisata budaya sebagai pelestarian kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran akan budaya lokal dan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai proses pembelajaran untuk mencintai kebudayaan lokal dan upaya pelestarian lingkungan. Serta bisa menjadi salah satu referensi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan tugas dan fungsi.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam membuat program-program baru dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Kediri. Selain bermanfaat untuk pemerintah penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat. Kemudian manfaat untuk penulis yaitu

pengetahuan tentang peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola pariwisata dan budaya di lingkungan pemerintahan sebagai implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) khususnya tentang fungsi pariwisata dan kebudayaan untuk semakin meningkatkan kecintaan kepada budaya dan melestarikan budaya.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran variable dari konsep yang bersifat abstrak. Operasional dapat dimaknai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau melakukan penelitian. Definisi operasional diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tertentu yang diberikan kepada konstruk atau variable dengan memberikan arti.

### **1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan atau pangkat pada posisi tertentu. Peran dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau pemenang kedudukan yang utama dan menjadi bagian dalam terjadinya suatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasar norma atau suatu peraturan tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Vidi Ravael Tasik, Sarah Sambiran, and Stefanus Sampe, "Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).

Dinas pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas yang terletak di kabupaten sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang pariwisata dan kebudayaan.<sup>32</sup>

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan bidang pariwisata dan budaya.<sup>33</sup> Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam suatu kabupaten atau daerah adalah untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang terkait dengan Pengembangan sektor pariwisata dan budaya di wilayah tersebut. Pada penelitian ini peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variable bebas.

## 2. Destinasi Wisata Budaya

Destinasi adalah wilayah geografis yang terdiri dari semua layanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk masa tinggal segmen pariwisata tertentu.<sup>34</sup> Destinasi bisa dikatakan sebagai wilayah geografis seperti negara, pulau, atau kota.<sup>35</sup> Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>32</sup>Tina, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik, "Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep" 2, no. 2 (2021).

<sup>33</sup>Dinda Puspa Prastiyanti and Yulianto, "Media Promosi Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan," *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 2, no. 2 (2019).

<sup>34</sup>Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Pertama (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021).

<sup>35</sup>Rob Davidson and Robert Maitland, *Tourism Destinations* (London: Hodder and Stoughton, 1997), <https://doi.org/10.1177/0047287598037001117>.

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>36</sup>

Destinasi wisata atau destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang dapat menimbulkan daya tarik dimana di dalamnya terdapat pula fasilitas, aksesibilitas yang membuat wisatawan ingin melihat dan berkunjung. Dapat kita ketahui bahwa destinasi wisata budaya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya, kampung adat, makam raja-raja, museum dan sanggar tari atau sanggar seni.<sup>37</sup> Pada penelitian ini destinasi wisata dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variable terikat.

### 3. *Fiqh Bī'ah*

*Fiqh Bī'ah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-bī'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu, pemahaman. Sedangkan secara istilah *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis

---

<sup>36</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966 , Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 59 Halaman.

<sup>37</sup>Nurul Farha Hi Adam, Cynthia E V Wuisang, and Johansen C Mandey, "Analisis Potensi Wisata Budaya Di Kota Ternate Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Perkotaan," *Spasial* 6, no. 3 (2019).

yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>38</sup> Adapun kata "al-bī'ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>39</sup> *Fiqh Bī'ah* adalah kerangka berpikir umat Islam untuk memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan.<sup>40</sup> Pada penelitian ini *Fiqh Bī'ah* dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variable terikat.

Pemaparan beberapa variabel dari definisi operasional diatas bertujuan agar pembaca tidak ambigu dalam mengartikannya, sehingga peneliti dan pembaca memiliki penafsiran yang sama terhadap objek yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu definisi operasional memudahkan pembaca memahami variabel yang sedang diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka penulis penyesuaian dengan pedoman penulisan karya ilmiah dengan cermat dan detail, agar skripsi ini sesuai dengan standar dan panduan yang telah

---

<sup>38</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, ed. Mazuki Wahid, Helmy Ali, and Marya Ulpa (Jakarta: UFUK Press, 2006).

<sup>39</sup>M Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Pedoman Ilmu Jaya, 1996).

<sup>40</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Cetakan Sa (Jakarta: Kemenag RI, 2011).

ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pendahuluan adalah bagian awal dari penelitian ini yang akan membahas beberapa komponen penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, akan diuraikan konteks masalah yang menjadi dasar penelitian, pertanyaan yang akan dijawab, tujuan yang ingin dicapai, dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian ini, dan panduan singkat tentang struktur keseluruhan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka: Tinjauan Pustaka akan merangkum pengetahuan yang telah ada terkait topik penelitian ini. Bagian ini terdiri dari dua sub-bab utama, yaitu penelitian terdahulu yang mengulas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dalam penelitian, serta kerangka teori atau landasan teori yang akan digunakan sebagai panduan utama dalam penelitian ini. Dengan merinci penelitian terdahulu dan kerangka teori ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait konteks penelitian serta landasan konseptual yang kuat untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Metode Penelitian akan membahas secara detail aspek-aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang akan dibahas meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek atau sampel, jenis

dan sumber data yang digunakan, serta metode pengumpulan dan pengolahan data. Semua elemen ini akan diuraikan dengan jelas untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami secara mendalam proses pada penelitian ini

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian. Di dalam bab ini berisi hasil dari analisis data, baik data primer maupun sekunder, yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut akan digunakan untuk menjawab dengan cermat rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat pembahasan mendalam terkait temuan-temuan tersebut, menghubungkannya dengan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta menganalisis implikasi dan signifikansinya dalam konteks penelitian.

Bab V Penutup: Penutup adalah bagian akhir dari penelitian ini yang mencakup dua elemen penting, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini berisi rangkuman kesimpulan utama yang telah diperoleh dari analisis data dan pembahasan sebelumnya, dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, pada bagian ini terdapat saran-saran yang konstruktif berdasarkan temuan-temuan ini, yang dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya atau memberikan masukan berguna dalam konteks praktis atau kebijakan terkait topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian ini meneliti tentang peran dinas pariwisata dalam upaya pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri. Dari tinjauan penulis, penulis hanya menemukan yang hampir mirip tetapi tidak sama persis dengan penelitian penulis yang bersumber dari skripsi dan jurnal, berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fahmi Febri Prakoso, 2019. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Jember memiliki peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yaitu dengan melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.<sup>41</sup>

2. Lubis Hermanto, Ariani Rosadi, dan Muhsinin, 2019. "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Di Kota Bima". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Bima. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan teknik analisa menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal melalui media massa baik melaksanakan fungsi pengawasan dengan penyedia informasi tentang pelestarian budaya lokal hasilnya sudah cukup baik dan memadai. Kemudian strategi komunikasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal dalam pengembangan kepariwisataan melalui pementasan pementasan budaya bangsa yang sudah cukup baik dan memadai. Selain itu strategi komunikasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal dalam pengembangan kepariwisataan melalui

---

<sup>41</sup>Fahmi Febri Prakoso, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember" (Universitas Jember, 2018).

melibatkan peran pemerintah baik melakukan dalam pembinaan tentang kebudayaan lokal maupun melakukan dalam pengembangan tentang kebudayaan lokal hasilnya sudah cukup baik dan memadai.<sup>42</sup>

3. Fitriana, Yusuf Adam Hilman, dan Bambang Triono, 2019. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa potensi kebudayaan lokal yang memiliki jumlah tertinggi diduduki oleh kesenian Reog Ponorogo yang mana kesenian tersebut merupakan asli dari Ponorogo yang sudah dikenal di kancah nasional dan internasional. Kemudian Dinas pariwisata dan kebudayaan tidak hanya berupa fokus pada kegiatan festival dan sosialisasi namun memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengenalkan budaya lokal dan bekerjasama dengan masyarakat yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Sehingga dalam realisasi program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi

---

<sup>42</sup>Hermanto, Rosadi, and Muhsninin, "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Di Kota Bima."

4 unsur teori pengembangan nilai, pengembangan teknis, pengembangan sosial, dan pengembangan budaya daerah.<sup>43</sup>

4. Andri Satria, 2019. "Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan cagar budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tidak maksimal. Dikatakan tidak maksimal karena dalam pengembangan cagar budaya belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan, perawatan dan perlindungan cagar budaya serta banyak cagar budaya yang tidak terselamatkan diakibatkan oleh kurangnya kepedulian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga masyarakat kurang mengetahui sejarah Kabupaten Kuantan Singingi dan letak letak cagar budaya di kabupaten Kuantan Singingi yang bisa dijadikan objek wisata budaya serta

---

<sup>43</sup>Fitriana, Hilman, and Triono, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal."

meningkatkan perekonomian daerah serta masyarakat dalam pariwisata.<sup>44</sup>

5. Taufiqurrahman, 2020. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya Istana Dalam Loka Sebagai Potensi Wisata Daerah". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam pelestarian cagar budaya Istana Dalam Loka meliputi penempatan juru pelihara, pemugaran dan pemanfaatannya untuk berbagai aspek. Sedangkan peran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan cagar budaya Istana Dalam Loka meliputi penataan kawasan, menjadikan Istana Dalam Loka sebagai destinasi wisata dan promosi melalui *event* pariwisata daerah.<sup>45</sup>
6. Nursaleh Hartaman, Wahyuni, Nasrullah, Yusril Has, Rezki Aitul Hukmi, Wahyuda Hidayat, dan Andi Ahmar Ihwal Ikhsan. 2021. "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Majene". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

---

<sup>44</sup>Andri Satria, "Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya Di Kabupaten Kuantan Singingi" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

<sup>45</sup>Taufiqurrahman, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Cagar Budaya Istana Dalam Loka Sebagai Potensi Pariwisata Daerah" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majene. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara. Teknik analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari empat tahapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendorong semangat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar melindungi budaya lokal yang masih eksis sampai saat ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene fokus pada pengembangan destinasi wisata budaya dan melakukan festival budaya berbasis kearifan lokal sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang ada di Majene. Objek wisata budaya berwujud pertunjukan seni yang berjumlah 11 jenis yang berbeda dan festival rutin yang diadakan pemerintah daerah Majene dengan 10 acara festival berbeda setiap tahunnya.<sup>46</sup>

7. Desprio Anggara, 2021. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Ranai di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara penelitian. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>46</sup>Nursaleh Hartaman et al., "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021).

menjelaskan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian tradisi randai di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sudah terlaksana karena sudah adanya kegiatan pembinaan pada kelompok randai, dan adanya bantuan peralatan yang diberikan kepada sebagian kelompok randai. Melalui 12 peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan kebudayaan, hanya dua peran yang belum terlaksana sebagai mestinya, yaitu peran dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan, dan melakukan penyusunan petunjuk teknis pelestarian kebudayaan.<sup>47</sup>

8. Shahril Budiman, Chindy Claudhia, dan Edward Mandala, 2022. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor peran yang mendukung perlu diperhatikan dalam pemeliharaan benda cagar budaya berlangsung, yaitu peranan pemerintah dalam bidang regulator dimana pemerintah yang membantu mengatur dan menyiapkan arah untuk penyeimbangan penyelenggaraan dan pelestarian cagar budaya, dalam bidang dinamisator berperan sebagai penggerak,

---

<sup>47</sup>Desprio Anggara and Rury Febrina, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Randai Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017," *JOM FISIP* 8 (2017).

dan dalam bidang fasilitator yang berfungsi memfasilitasi segala bidang pendampingan melalui latihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.<sup>48</sup>

9. Alycia Marsheilla, 2022. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal". Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam pelestarian budaya lokal memiliki peranan sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan sebagai terapi. Namun terdapat faktor penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam pelestarian budaya lokal diantaranya regulasi kebijakan belum ditetapkan sebagai dasar acuan strategi pelestarian budaya lokal, strategi yang belum optimal, koordinasi dengan lembaga dan organisasi seni-budaya yang belum optimal, minimnya kapasitas SDM khususnya di bidang kebudayaan, dan minimnya anggaran kelembagaan. Untuk menyelesaikan faktor penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

---

<sup>48</sup>Shahril Budiman, Chindy Claudhia, and Edward Mandala, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Di Pulau Penyengat," *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* 2, no. 2 (2022).

memiliki strategi yang dilakukan yaitu menyusun dan mengusulkan regulasi atau kebijakan tentang pelestarian kebudayaan, memberikan sosialisasi tentang kebudayaan lokal, melakukan pembinaan untuk SDM di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya bidang kebudayaan, dan pencairan dana atau anggaran.<sup>49</sup>

10. Jimmy Arnold Kila, Ventje Kasenda, dan Gustaf Undap, 2023.

"Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam optimalisasi pemerintah daerah dalam pelestarian budaya di Kabupaten Halmahera Utara belum maksimal. Kemudian peran sebagai dinamisor pemerintah daerah khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara dalam pelestarian belum terlihat di masyarakat. Hal tersebut karena tidak adanya program yang menunjang

---

<sup>49</sup>Alycia Marsheilla, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal" (Universitas Islam "45" 2022).

pelestarian budaya dari pemerintah daerah, serta turunnya minat masyarakat akan budaya.<sup>50</sup>

Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaruan
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember, Fahmi Febri Prakoso.	Pentingnya peningkatan regulasi dan pemantauan cagar budaya serta pemberdayaan masyarakat lokal.	Peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yaitu dengan melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sudah berjalan dengan baik.	Objek pada penelitian Fahmi Febri Prakoso mengerucut pada pelestarian cagar budaya sedangkan pada penelitian ini pelestarian destinasi wisata budaya.	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif <i>Fiqh Bī'ah</i> menjadi unsur pembaruan dari penelitian yang akan dilakukan.
Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Di Kota Bima, Lubis Hermanto, Ariani Rosadi dan Muhsinin.	Pentingnya strategi komunikasi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal dalam konteks pariwisata budaya.	Strategi komunikasi melalui media massa telah berhasil dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangan kepariwisataan melalui pementasan budaya nasional telah berjalan dengan baik dan memuaskan.	Tinjauan pokok pada penelitian Lubis Hermanto dkk pada strategi komunikasi Dinas Pariwisata sedangkan pada penelitian ini pada peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal, Fitriana, Yusuf Adam Hilman, Bambang	Peran krusial Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, khususnya	Fokus Dinas pariwisata dan kebudayaan tidak hanya pada festival dan sosialisasi, namun memanfaatkan peluang untuk mempromosikan budaya lokal ke	Fokus penelitian Fitriana dkk pada kesenian reog ponorogo, sedangkan pada penelitian ini pelestarian destinasi wisata budaya.	

<sup>50</sup>Jimmy Arnold Kila, Ventje Kasenda, and Gustaf Undap, "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara)" 3, no. 1 (2023).

Triono.	kesenian budaya lokal	kancah internasional.		
Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi, Andri Satria.	Pentingnya pelestarian cagar budaya serta perlindungan benda-benda, bangunan, struktur, dan situs bersejarah sebagai warisan budaya nasional.	Pengembangan cagar budaya dikatakan tidak maksimal karena kurangnya sosialisasi, perawatan dan perlindungan cagar budaya, sehingga banyak cagar budaya yang tidak terselamatkan.	Fokus penelitian Andri Satria pada strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan pada penelitian ini pada peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya Istana Dalam Loka Sebagai Potensi Wisata Daerah, Taufiqurrahman.	Urgensi pelestarian dan pengembangan cagar budaya sebagai potensi wisata.	Pelestarian cagar budaya Istana Dalam Loka meliputi penempatan juru pelihara, pemugaran dan pengembangannya meliputi penataan kawasan, menjadikan sebagai destinasi wisata.	Objek pada penelitian Taufiqurrahman mengerucut pada pengembangan cagar budaya sedangkan pada penelitian ini pelestarian destinasi wisata budaya.	
Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Majene, Nursaleh Hartaman dkk.	Tantangan disrupsi budaya dalam menjaga kearifan lokal serta strategi pengembangan wisata budaya.	Fokus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada pengembangan destinasi wisata budaya dan melakukan festival budaya berbasis kearifan lokal.	Pada penelitian Majene dkk fokus pada pengembangan destinasi wisata budaya, sedangkan pada penelitian ini pada pelestarian destinasi wisata budaya.	
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya	Urgensi pemeliharaan budaya tradisional	Upaya pelestarian tradisi randai dapat dikatakan sudah terlaksana karena	Pada penelitian Desprio Anggara fokus kajian pada pelestarian	

Pelestarian Tradisi Ranai di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, Desprio Anggara.	seperti Randai serta peran pemerintah dan upaya komunikasi dan publikasi.	sudah adanya kegiatan pembinaan pada kelompok randai, dan adanya bantuan peralatan yang diberikan kepada sebagian kelompok randai.	tradisi ranai, sedangkan penelitian ini pelestarian destinasi wisata budaya.	
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat, Shahril Budiman dkk.	Kewajiban pemeliharaan benda cagar budaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.112/M/2018 .	Dalam pemeliharaan benda cagar budaya pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.	Penelitian ini fokus pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.112/M/2018, sedangkan penelitian ini pada peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022.	
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal, Alycia Marsheilla	Pentingnya perlindungan dan pelestarian kearifan lokal untuk menjaga kebudayaan di tengah transformasi sosial budaya dan modernisasi.	Dalam pelestarian budaya lokal menghadapi faktor penghambat, untuk mengatasi masalah akan dilakukan penyusunan regulasi, memberikan sosialisasi, melakukan pembinaan SDM, dan pencairan dana.	Peneliti Alycia Marsheilla menggunakan teori tentang dimensi peran sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam sudut pandang menurut <i>Fiqh Bī'ah</i> .	
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal, Jimmy Arnold Kila, Ventje Kasenda, Gustaf Undap.	Kurangnya penggunaan bahasa lokal dalam upaya pelestarian budaya.	Peran sebagai regulator belum maksimal, dan peran sebagai dinamisator dalam pelestarian belum terlihat di masyarakat, dapat dilihat tidak adanya program yang menunjang	Topik penelitian Jimmy Arnold Kila dkk pada peran pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian ini terhadap peran Dinas Pariwisata dalam penelitian	

		pelestarian budaya.	ini.	
--	--	---------------------	------	--

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian secara umum berupa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian destinasi wisata budaya yang memiliki peran sangat penting, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yang paling mencolok diantara sepuluh penelitian terdahulu tidak ada tinjauan perspektif *Fiqh Bī'ah* dalam penelitian tentang peran Dinas Pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya. Namun dalam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas sebagai salah satu referensi penulis dalam menulis penelitian guna memperbanyak teori yang digunakan pada penelitian.

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.<sup>51</sup> Secara umum, kajian pustaka didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Latar belakang yang membahas fungsi persiapan pengumpulan data aktual biasanya akan

---

<sup>51</sup>Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka," *Media Informasi* 28, no. 1 (2019).

tertulis dalam sebuah tinjauan literatur di dalam setiap survei dan penelitian eksperimental.<sup>52</sup> Peneliti menggunakan kajian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan *Fiqh Bī'ah*.

#### 1. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kediri, yang selanjutnya disingkat “disparbud” kabupaten Kediri, merupakan lembaga dinas daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Tugas dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas.

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>53</sup> Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri didukung dengan peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

---

<sup>52</sup>Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research),” *Mahosi* 02 (2021).

<sup>53</sup>Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Bpmd ) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau,” *Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2015).

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Setiap lembaga pasti terdapat tugas dan fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau bupati setempat. Tugas dan fungsi memiliki peran penting salah satunya sebagai acuan dalam bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud.<sup>54</sup> Tugas merupakan suatu hal yang dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Hal tersebut karena telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>55</sup> Keberadaan tugas memberikan landasan konkrit bagi setiap anggota lembaga untuk berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut Moekijat "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".<sup>56</sup> Berdasarkan definisi tugas di atas dapat kita ketahui bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>54</sup>Iis Hermaeny Farantika, "Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).

<sup>55</sup>Dewi Kurniangsih, Agus Subagyo, dan Agustina Setiawan, "Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, no. 1 (2022).

<sup>56</sup>Moekijat, *Analisis Jabatan*, Cetakan VI (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998).

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.

Sedangkan pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi menurut Sutarto yaitu rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.<sup>57</sup> Secara keseluruhan, tugas dan fungsi dalam organisasi, khususnya dalam konteks Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, memiliki peran penting sebagai panduan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas mencakup pekerjaan pokok yang rutin dilakukan oleh anggota organisasi, sementara fungsi adalah rincian tugas yang berhubungan satu sama lain.

---

<sup>57</sup>Sri Ayu Lestari and Ismail Tolla, "Pelaksanaan Tupoksi Layanan Tenaga Administrasi Sekolah Di Sma Negeri 1 Makassar," *Jurnal Administrasi, Kebijakan Dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]* 2, no. 1 (2021).

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, definisi tugas dan fungsi dalam konteks organisasi tidak hanya merujuk pada pemenuhan tanggung jawab individu atau unit, tetapi juga menekankan pada interkoneksi dan sinergi antara berbagai elemen dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran dalam sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemasaran dan informasi kepariwisataan;
- b. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pemasaran pariwisata;

- d. pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan serta pengiriman atau menerima wisatawan;
- e. pelaksanaan promosi dan kerjasama dalam dan luar negeri, publikasi dan pelayanan informasi serta *road show* pariwisata;
- f. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- g. pelaksanaan branding pariwisata dan penetapan tagline pariwisata kabupaten;
- h. pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- i. penyelenggaraan *event* terkait pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang pemasaran pariwisata.<sup>58</sup>

## 2. *Fiqh Bī'ah*

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,

---

<sup>58</sup>Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>59</sup> Lingkungan menurut Otto Soemarwoto dalam buku “Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan” menjelaskan lingkungan adalah ruang yang menempati suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya yang menempati ruang tertentu. Sedangkan dalam Kamus Ekologi lingkungan yaitu bagian dari keseluruhan yang berhubungan satu sama lain. Selain itu lingkungan juga berkaitan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Keseluruhan tersebut berada secara alami di bumi dan daerah-daerah lainnya.<sup>60</sup>

Lingkungan berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alami secara dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alami terdiri dari atas sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada baik itu komponen fisik maupun biologis. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jenis lingkungan yang dibuat

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 71 Halaman.

<sup>60</sup> Hutan, “Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat.”

oleh manusia ditujukan untuk memenuhi manfaat yang sangat baik bagi manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya.<sup>61</sup>

*Fiqh* lingkungan (*Fiqh Bī'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *bī'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman), Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>62</sup> Adapun kata "*al-bī'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>63</sup> Lebih dari sekadar pemahaman teoretis, *Fiqh Bī'ah* memiliki fokus praktis dalam merumuskan pedoman dan norma-norma untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

*Fiqh Bī'ah* adalah kerangka berpikir umat Islam untuk memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Berdasarkan definisi di atas dapat kita pahami bahwa *Fiqh Bī'ah* atau *fiqh* lingkungan adakah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang kompeten dan berdasarkan

---

<sup>61</sup> Hutan.

<sup>62</sup> Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

<sup>63</sup> Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*.

dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>64</sup> Selain itu, dapat kita berikan pengertian bahwa *Fiqh Bī'ah* adalah ketentuan-ketentuan Islam yang berasal dari dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Dalam konteks penuturan Ali Yafie, *Fiqh Al-Bī'ah* mempunyai dua landasan yaitu, pertama pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah sebagian dari iman dari sinilah sebuah kualitas Iman manusia dapat dinilai salah satunya yaitu bagaimana rasa sensitivitas dan kepekaan manusia terhadap lingkungan hidup, kemudian yang kedua yaitu melestarikan dan melindungi lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban setiap orang yang mempunyai akal dan baligh (dewasa). Kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara ibadah kepada Allah SWT kemudian mampu menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.<sup>65</sup>

Adapun pilar dari *fiqh* lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran agama Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau mengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengemban alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia

---

<sup>64</sup> Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

<sup>65</sup> Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar akan perintah Allah, mengingkari eksistensi kemaklukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Allah.

Kehadiran *Fiqh Bī'ah* untuk memberikan penjelasan kepada manusia bagaimana tata aturan perilaku dan sikap seorang muslim dalam menjaga dan menghadapi persoalan lingkungan sekitar. Konsep lingkungan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan komprehensif dalam jiwa untuk mengendalikannya.<sup>66</sup> Persoalan lingkungan hidup tidak sampai hanya pada permasalahan pencemaran, sampah, penanaman kembali atau sekedar pelestarian alam, namun lebih dari itu seluruh permasalahan lingkungan hidup termasuk dalam ruang lingkup suatu pemahaman hidup.

Problematika lingkup mengenai dengan pemahaman dan sikap hidup manusia guna melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian rupa norma-norma *fiqh* yang sebagai penjelasan dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang

---

<sup>66</sup>Saipul Nasution, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02 (2015).

dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan bantuan terhadap upaya pengembangan lingkungan hidup.<sup>67</sup>

Ali Yafie menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif *Fiqh Bī'ah*, yaitu antara lain:<sup>68</sup>

1. Pemeliharaan jiwa, raga, dan kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga.
2. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.
3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).
4. Keselarasan (*muthabaqoh*) dan keseimbangan (*tawazun*) alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
5. Makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu.

---

<sup>67</sup>Ali Yafie, *Menggas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994).

<sup>68</sup>Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

6. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, *al-Muwafaqat*, merumuskan *maqashid al-syari'ah* menjadi lima hal: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Ada yang menambahkan memelihara martabat (*hifdz al-'irdh*). Pendapat ini yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan dalam berijtihad untuk memecahkan masalah sosial-kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fikih dan umat Islam tentunya.

Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dharuriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara/rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.<sup>69</sup>

Melalui pemahaman yang telah diuraikan dalam kajian pustaka di atas, diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang peran, tugas

---

<sup>69</sup>Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj A. Hakim Shah, Dkk (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002).

dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta konsep *Fiqh Bī'ah* dalam konteks lingkungan hidup dalam ajaran Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi salah satu cara yang di gunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan. Untuk memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis empiris, merupakan pendekatan yang tidak hanya memfokuskan pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mendalam ke realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat, mengumpulkan fakta-fakta sebagai data penelitian.<sup>70</sup>

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar mendapat hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian yuridis empiris karena berdasarkan judul yang diangkat mengarah kepada “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya Menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Dan *Fiqh Bī’ah*”,

---

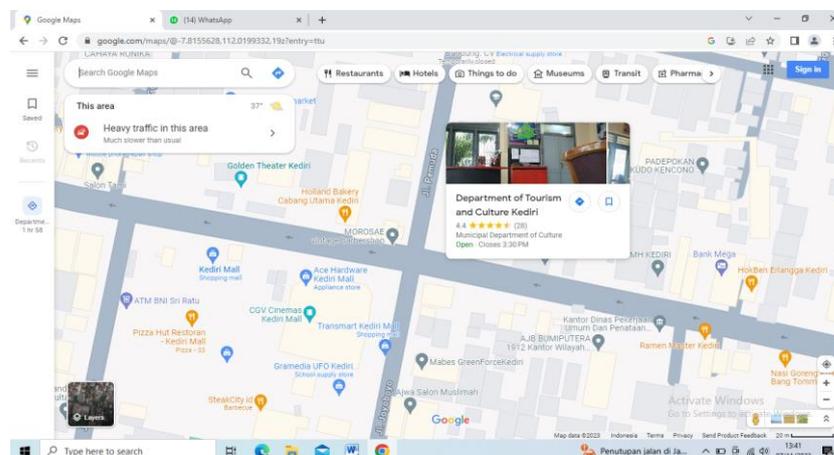
<sup>70</sup>Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

penelitian yang akan dilakukan adalah berdasarkan data yang ada di lapangan.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Bahder Johan Nasution merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Sehingga pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dengan menguraikan bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah mengkaji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat.<sup>71</sup>

## C. Lokasi Penelitian



<sup>71</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

(sumber: google maps)

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian komunikasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.<sup>72</sup> Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Erlangga No.1, Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri. Pemilihan lokasi di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kediri dikarenakan peneliti ingin meneliti peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam pelestarian destinasi wisata budaya menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2022, dimana Kediri memiliki sejarah yang kaya sebagai ibu peradaban di Indonesia sehingga Kediri memiliki potensi unik dan kondisi luar biasa yang tidak dimiliki daerah lain.

#### D. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling yang terdiri atas 15 informan yaitu: Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Sekretaris Kecamatan Kepung, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates, PLT Sosial Kecamatan Wates, Kepala Desa Pojok, Sekretaris Desa Keling, Kasi Pemerintahan Desa Tujurejo, Penggerak Desa Wisata Desa Keling, Pengelola Destinasi Wisata Goa Jegles, Juru Pelestari Situs Ndalem Pojok, Relawan Situs Ndalem Pojok, dan

---

<sup>72</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

masyarakat sekitar destinasi wisata Goa Jegles dan Situs Ndalem Pojok. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Salah satu metode pengambilan sampel purposive sampling, peneliti menetapkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian hingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian.<sup>73</sup>

#### E. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data, sumber data dikategorikan dalam dua jenis berupa data primer dan data sekunder.

Berikut Sumber data yang digunakan:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan sebagai narasumber.<sup>74</sup> Pada penelitian ini data yang digunakan pada data primer bersumber dari informan yang berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri yaitu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Sekretaris Kecamatan Kepung, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem, Kasi

---

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>74</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates, PLT Sosial Kecamatan Wates, Kepala Desa Pojok, Sekretaris Desa Keling, Kasi Pemerintahan Desa Tujurejo, Penggerak Desa Wisata Desa Keling, Pengelola Destinasi Wisata Goa Jegles, Juru Pelestari Situs Ndalem Pojok, Relawan Situs Ndalem Pojok, dan masyarakat sekitar destinasi wisata Goa Jegles dan Situs Ndalem Pojok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022, buku Fiqh Bi`ah Ali Yafie, jurnal, dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelestarian destinasi wisata budaya.

---

<sup>75</sup>Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Ekonomi* 21, no. 3 (2019).

Data yang terdapat dalam penelitian ini baik data primer dan sekunder akan digunakan sebagai dasar pemikiran yang memiliki orientasi teoritis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang akan peneliti paparkan memiliki akurasi tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Data-data ini akan menjadi pijakan utama dalam menyusun argumen dan mengembangkan kerangka konseptual yang kuat dalam rangka menjalankan penelitian ini dengan integritas akademik yang tinggi.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan:

##### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan mendapat informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>76</sup> Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview*

---

<sup>76</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

*guide* (panduan wawancara). Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara berencana yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pernyataan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua informan yang diseleksi untuk wawancara diajukan pertanyaan yang sama dengan kata-kata dan dalam tata urutan yang segaram.<sup>77</sup> Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan dengan 15 informan yaitu:

1. Kepala bidang pemasaran pariwisata yaitu Puspita Dwi
2. Kepala bidang pengembangann pariwisata yaitu Sabila Rosad
3. Sekretaris Kecamatan Kepung yaitu Agus Joko P
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem yaitu Sumarno
5. PLT Sosial Kecamatan Wates yaitu Azwar Anas
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates yaitu Ba`do Utama
7. Kepala Desa Pojok yaitu Darwanto
8. Sekretaris Desa Keling yaitu Ahmad Farid Arza
9. Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo yaitu Sugianto

---

<sup>77</sup>Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta*, vol. 2 (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

10. Penggerak Desa Wisata Desa Keling yaitu M Didin Saputro
11. Juru Pelihara Situs Ndalem Pojok yaitu Siti Marwiyah
12. Relawan Situs Ndalem Pojok yaitu Irmawati
13. Pengelola destinasi wisata Goa Jegles yaitu M Ali Imran
14. Masyarakat sekitar destinasi wisata Goa Jegles Sri Wahyuni
15. Masyarakat Sekitar destinasi wisata Situs Ndalem Pojok Zulfa Arum Lestari.

b. Metode Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengukur data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

## G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>79</sup> Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

Selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini diuraikan mengenai peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelestarian destinasi wisata budaya dengan tahapan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>80</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Kediri**

Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara  $111^{\circ} 47' 05''$  sampai dengan  $112^{\circ} 18'20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36' 12''$  sampai dengan  $8^{\circ} 0' 32$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni :

- Sebelah Barat : Tulungagung dan Nganjuk
- Sebelah Utara : Nganjuk dan Jombang
- Sebelah Timur : Jombang dan Malang
- Sebelah Selatan : Blitar dan Tulungagung

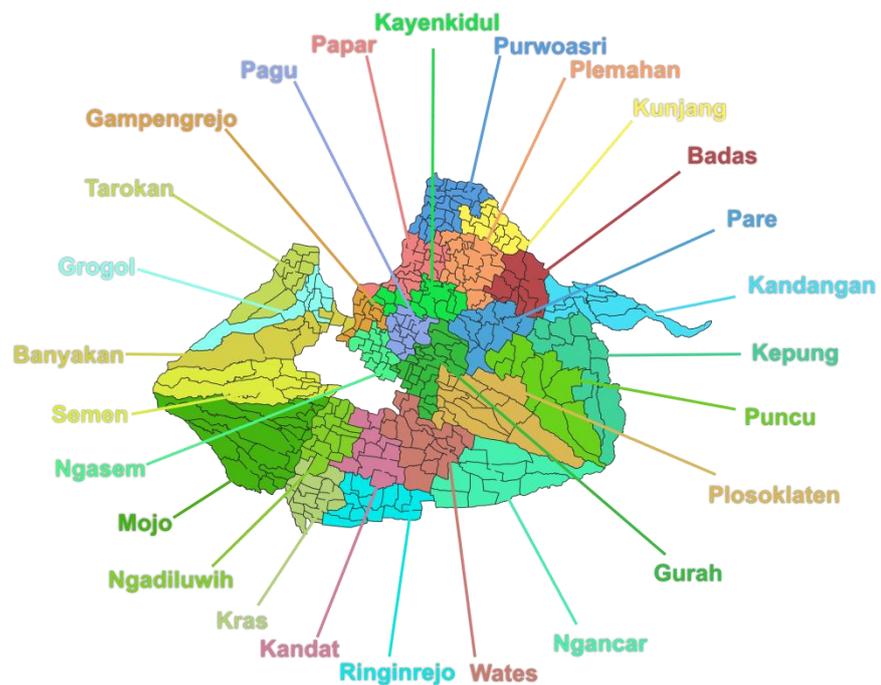
Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.

- Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23° C sampai dengan 31° C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari. secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05 KM2 atau + 5%, dari luas wilyah propinsi Jawa Timur.<sup>81</sup>

Gambaran Umum Peta Wilayah Kabupaten Kediri



(sumber: <https://kedirikab.go.id/geografis>)

<sup>81</sup>Pemerintah Kab Kediri, "Peta Wilayah Kabupaten Kediri," n.d.



pelestarian lingkungan melalui sebuah ritual. Dalam masyarakat Jawa terdapat ritual yang berhubungan langsung dengan alam. Masyarakat Kediri juga mengenal ritual yang berhubungan dengan alam. Meskipun masyarakat Kediri mayoritas beragama islam tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu melakukan balas budi terhadap alam yang telah menyediakan fasilitas untuk manusia melakukan segala bentuk kegiatan.<sup>82</sup>

Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang masih alami dan budaya masyarakat yang masih berorientasi kepada kearifan lokal menjadikan kabupaten Kediri memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang jika berhasil dikembangkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah maupun negara. Pengembangan objek wisata akan memberikan keuntungan dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat, pengembangan potensi desa dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat masing-masing desa.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ita Kurnia, "Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2019).

<sup>83</sup>M. Arief Anwar et al., "Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 2 (2018).

## 2. Kondisi Demografis Kabupaten Kediri

Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin,  
2021-2022

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki Male		Perempuan Female		Jumlah Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
[010] Mojo	41 483	41 623	39 881	40 146	81 364	81 769
[020] Semen	27 695	27 636	26 807	26 987	54 502	54 623
[030] Ngadiluwih	40 661	40 638	40 470	40 517	81 131	81 155
[040] Kras	32 280	32 336	32 024	32 049	64 304	64 385
[050] Ringinrejo	29 792	29 963	28 960	29 074	58 752	59 037
[060] Kandat	31 786	32 000	31 462	31 587	63 248	63 587
[070] Wates	46 410	46 585	45 836	46 134	92 246	92 719
[080] Ngancar	26 375	26 472	25 751	25 870	52 126	52 342
[090] Plosoklaten	38 634	38 740	37 751	37 864	76 385	76 604
[100] Gurah	42 352	42 547	41 677	41 859	84 029	84 406
[110] Puncu	33 449	33 552	32 290	32 391	65 739	65 943
[120] Kepung	44 642	44 631	42 878	42 944	87 520	87 575
[130] Kandangan	26 807	26 630	26 226	26 152	53 033	52 782
[140] Pare	54 554	54 788	54 103	54 209	108 657	108 997
[141] Badas	35 265	35 272	34 025	34 165	69 290	69 437
[150] Kunjang	19 240	19 274	19 048	19 107	38 288	38 381
[160] Plemahan	31 759	31 699	31 260	31 223	63 019	62 922
[170] Purwasri	31 015	30 950	30 871	30 702	61 886	61 652
[180] Papar	27 686	27 594	27 350	27 273	55 036	54 867
[190] Pagu	20 689	20 757	20 350	20 387	41 039	41 144
[191] Kayenkidul	24 585	24 547	24 361	24 400	48 946	48 947
[200] Gampengrejo	17 309	17 214	16 793	16 792	34 102	34 006
[201] Ngasem	32 000	31 778	31 997	31 801	63 997	63 579
[210] Banyakan	30 421	30 215	29 633	29 534	60 054	59 749
[220] Grogol	24 898	24 890	24 128	24 133	49 026	49 023
[230] Tarokan	33 365	33 195	32 074	31 992	65 439	65 187
<b>Kabupaten Kediri</b>	<b>845 152</b>	<b>845 526</b>	<b>828 006</b>	<b>829 292</b>	<b>1 673 158</b>	<b>1 674 818</b>

Catatan/Note: Hasil Registrasi/Registration Result

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri/Population and Civil Registration Agency of Kediri Regency

Berdasarkan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 1.674.818 jiwa terdiri atas 845.826 jiwa penduduk laki-laki dan 828.292 jiwa

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan angka tahun 2021, penduduk kabupaten Kediri mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen. Keadaan Kerja yang Tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pencari Kerja yang belum ditempatkan tahun lalu/ Job Seekers that have not been placed last year</b>					
Laki-laki/ Male	279	566	184	225	191
Perempuan/ Female	419	693	165	274	232
Jumlah/ Total	698	1 259	349	499	423
<b>Pencari Kerja yang terdaftar/ Registered Job Seekers</b>					
Laki-laki/ Male	4 611	4 596	3 150	3 053	4.781
Perempuan/ Female	5 637	6 617	3 852	3 725	5.843
Jumlah/ Total	10 248	10 123	7 002	6 778	10.624
<b>Pencari Kerja yang dikirim/ Job Seekers submitted</b>					
Laki-laki/ Male	4 340	4 398	2 975	2 986	4.277
Perempuan/ Female	5 303	5 376	3 638	3 650	5.443
Jumlah/ Total	9 643	9 774	6 613	6 636	9.720
<b>Pencari kerja yang ditempatkan/ Job-seekers are placed</b>					
Laki-laki/ Male	4 340	4 398	2 975	2 986	4.277
Perempuan/ Female	5 303	5 376	3 638	3 650	5.443
Jumlah/ Total	9 643	9 774	6 613	6 636	9.720
<b>Pencari Kerja yang dihapus/ Job Seekers removed</b>					
Laki-laki/ Male	-	-	-	-	-
Perempuan/ Female	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total	-	-	-	-	-
<b>Pencari Kerja yang belum ditempatkan pada akhir tahun/ Job Seekers that have not been placed at the end of the year</b>					
Laki-laki/ Male	273	184	212	191	504
Perempuan/ Female	332	165	177	232	400
Jumlah/ Total	605	349	389	423	904

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri /Manpower Department of Kediri Regency

### 3. Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

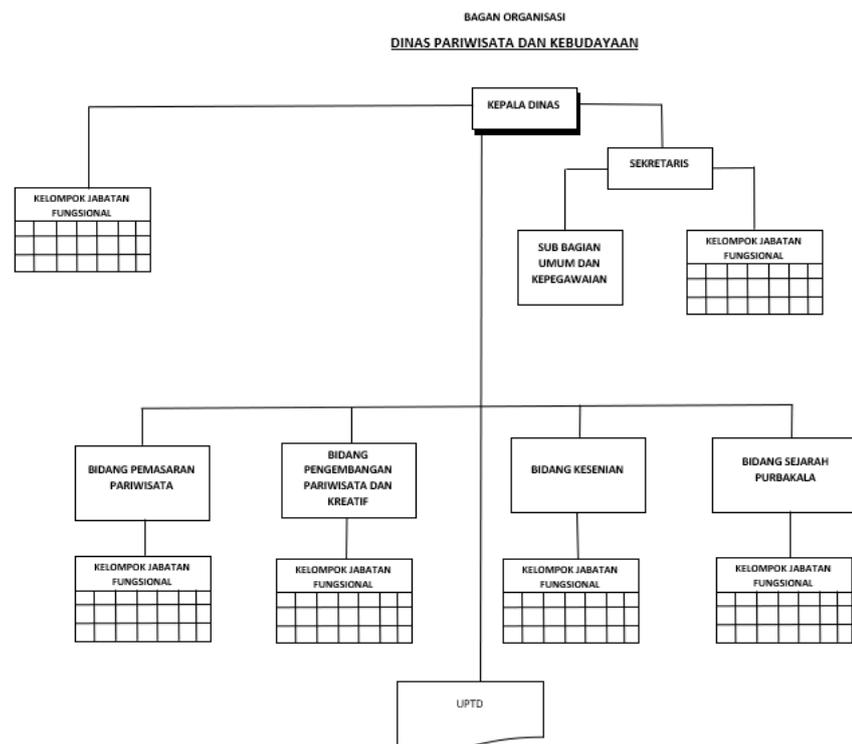
Pejabat : **Ir. ADI SUWIGNYO, M.Si.**

Alamat Kantor : Jl. Erlangga No. 1 Kediri

No. Telepon : (0354) 691776

Website : <http://pariwisata.kedirikab.go.id/>

Email : [disparbud@kedirikab.go.id](mailto:disparbud@kedirikab.go.id)



(sumber: <https://kedirikab.go.id/disparbud>)

#### 4. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

- (1) Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (2) Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Disparbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Disparbud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;

- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan daerah;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

##### (1) Susunan Organisasi Disparbud terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Kesenian;
- f. Bidang Sejarah dan Purbakala;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

##### (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.<sup>84</sup>

## **B. Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran dalam sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

### **1. Perumusan kebijakan**

Perumusan kebijakan merupakan tahapan dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan Islamy mendefinisikan perumusan kebijakan merupakan proses yang bertahap namun sulit untuk diselesaikan dengan baik, dan didalam kebijakan sangat penting diketahui peranan aktor dalam proses perumusan kebijakan tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Pemerintah Kab Kediri, "Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan," n.d.

<sup>85</sup>Didi Febriyandi, "Proses Perumusan Kebijakan Pemerkan Daerah (Studi Di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) Didi," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 2 (2016).

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan terkait perumusan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran tidak memiliki kebijakan pemasaran pariwisata, namun menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, misi utama Kabupaten Kediri yaitu optimalisasi pariwisata berbasis kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan. Pemanfaatan kearifan lokal belum sebanding dengan sumber daya, selain itu keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat pemanfaatan kearifan lokal. Sedangkan pengembangan kebudayaan terus dioptimalkan sebagai daya tarik utama sesuai dengan tagline "Kediri Berbudaya".

Implementasi perumusan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran belum optimal. Perumusan kebijakan bersifat sentralistik, dengan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui penerapan model kelembagaan. Sentralisasi ini berhubungan dengan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sentralisasi bisa dikatakan sebagai memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Selain itu, dapat diinterpretasikan juga bahwa sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh *decision* (keputusan atau kebijakan) dikeluarkan oleh pusat dan daerah tinggal menunggu

instruksi yang dikeluarkan pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu.<sup>86</sup>

Sedangkan Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah pemerintah. Jadi apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Disebutkan ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.<sup>87</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, terfokus pada optimalisasi pariwisata berbasis kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita perumusan kebijakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran masih kurang optimal yang dibuktikan dengan kepasifan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam perumusan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa perumusan

---

<sup>86</sup> Veronika, "Sentralisasi: Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangan Serta Contohnya," Gramedia Blog, accessed February 27, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kuitansi/>.

<sup>87</sup> Ferdynand Ngatu, "Analisis Kebijakan Desa Mandiri Anggur Merah Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Di Provinsi Ntt," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.15-28>.

kebijakan masih bersifat sentralistik dengan model kelembagaan belum optimal.

## 2. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan

Koordinasi merupakan sebuah usaha untuk mengharmonisasi berbagai elemen agar segala bagian yang ada dapat terintegrasikan secara efektif.<sup>88</sup> Fasilitasi digunakan persamaan dengan perlakuan pendampingan, yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metode dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan.<sup>89</sup> Sedangkan pembinaan pada dasarnya untuk membantu seseorang sehingga memperoleh kecakapan untuk mencapai target sesuai dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata menyelenggarakan kegiatan gathering dan sosialisasi yang diselenggarakan satu sampai dua kali dalam satu tahun. Pemerintah Desa Keling memberikan pelatihan digital marketing sebagai fasilitasi untuk menggali potensi dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Sehingga diperlukan pembinaan secara intensif dari Dinas Pariwisata

---

<sup>88</sup>Yayu Eka Kustari, Hanny Purnamasari, and Sopyan Resmana Adiarsa, "Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang Dalam Melayani Permohonan Pensiun Pegawai Negeri Sipil," *Kinerja* 18, no. 3 (2021).

<sup>89</sup>Luzian Pratama et al., "Analisis Bibliometrik: Kajian 'Fasilitasi' Dalam Isu Pemberdayaan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14268>.

<sup>90</sup>Lodovikus Bomans Wadu and Yustina Jaisa, "Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2017).

dan Kebudayaan dalam promosi karena untuk pemasaran memerlukan tim.

Implementasi pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana namun belum optimal. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata menggunakan koordinasi internal dan koordinasi vertikal. Theo Haiman mendefinisikan koordinasi sebagai sinkronisasi yang teratur dari upaya-upaya untuk menyediakan jumlah, waktu, dan kualitas pelaksanaan efisien sehingga secara sinergis mengarah pada tujuan umum perusahaan atau organisasi. Koordinasi internal merupakan koordinasi yang terjadi di dalam relasi suatu organisasi dan koordinasi vertikal berarti bersifat dari atas ke bawah atau sebaliknya dengan mematuhi rambu hierarki dalam suatu organisasi tersebut.<sup>91</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran masih kurang optimal yang dibuktikan dengan minimnya koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam pemasaran pariwisata perlu pembinaan yang lebih intensif, terutama dalam hal promosi

---

<sup>91</sup> Algons D.B Rahaja, "Koordinasi: Pengertian Menurut Para Ahli, 3 Tujuan, Jenis, Serta Beberapa Contohnya," Ekrut Media, 2022.

guna meningkatkan keterampilan dalam memasarkan destinasi wisata. Maka dapat dikatakan bahwa koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan yang bersifat koordinasi internal dan koordinasi vertical di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal.

### 3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama

Kebijakan kerjasama merujuk pada serangkaian panduan atau prinsip yang ditetapkan untuk membimbing dan mengarahkan interaksi atau kolaborasi antara berbagai pihak. Kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan bahwa kerjasama berjalan sesuai dengan rencana dan nilai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan terkait pelaksanaan kebijakan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata bekerjasama yang melibatkan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu melalui forum desa wisata dan sinergi antar desa kerjasama yang dilakukan sebagai salah satu media promosi.

Implementasi pelaksanaan kebijakan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana dan optimal. Pada pelaksanaan kebijakan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan kerjasama pemasaran pariwisata lokal, kerjasama pendidikan, dan kerjasama pengelolaan sumber daya. Kerjasama pemasaran pariwisata lokal merujuk pada upaya bersama

antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan pelaku industri pariwisata setempat, untuk mempromosikan dan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata di tingkat lokal. Kerjasama pendidikan merupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan pemasaran destinasi melalui program-program pendidikan dan promosi bersama. Sedangkan kerjasama pengelolaan sumber daya berkaitan dengan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang relevan dengan sektor pariwisata.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita pelaksanaan kebijakan kerjasama oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah optimal yang dibuktikan dengan bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan promosi. Selain itu pihak desa juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pemasaran pariwisata serta kolaborasi yang baik antar desa untuk mendukung pemasaran pariwisata. Maka dapat dikatakan bahwa kerjasama dengan pemasaran pariwisata lokal, kerjasama pendidikan, dan kerjasama pengelolaan sumber daya sudah optimal.

#### 4. Pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata

Pedoman merujuk pada seperangkat aturan, prinsip, atau petunjuk yang digunakan sebagai panduan untuk mengelola dan melaksanakan

kegiatan wisata. Sedangkan penyelenggaraan widyawisata merujuk pada pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan wisata secara praktis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan terkait pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata tidak memiliki pedoman khusus. Pedoman penerimaan wisatawan yang diatur oleh desa maupun pengelola destinasi wisata. Dalam pedoman widyawisata terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Tidak adanya pedoman untuk penerimaan wisatawan secara umum, sehingga perlu pengembangan panduan.

Implementasi pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran belum optimal. Saat ini belum terdapat pedoman untuk pengiriman dan penerimaan widyawisata di Kabupaten Kediri. Meskipun terdapat beberapa upaya dalam menyediakan pedoman penerimaan wisatawan di beberapa destinasi menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing yang diterapkan oleh pengelola. Namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri masih perlu mengembangkan untuk menciptakan panduan yang berlaku secara umum dan dapat diterapkan di seluruh destinasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, terungkap bahwa pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan dalam bidang pemasaran masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan pedoman yang komprehensif terkait pengiriman dan penerimaan wisatawan, khususnya dalam konteks menjaga lingkungan secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pedoman yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi menciptakan lingkungan yang indah, sehat, dan bersih. Upaya perbaikan dan peningkatan dalam implementasi pedoman tersebut menjadi krusial untuk mengoptimalkan pengalaman wisata serta memastikan dampak positif terhadap lingkungan yang dikunjungi.

5. Promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi

Promosi dalam pemasaran pariwisata merujuk pada serangkaian kegiatan untuk meningkatkan ketertarikan dan popularitas destinasi atau layanan pariwisata. Kerjasama mengacu pada kolaborasi atau kemitraan antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pariwisata, pelaku industri, dan masyarakat lokal. Sedangkan publikasi merupakan proses atau hasil dari penyebaran informasi atau materi tertentu untuk umum. Pelayanan informasi berupa upaya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan atau pemangku kepentingan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi berbagai strategi telah diimplementasikan. Penggunaan berbagai media seperti

sosial media, radio, koran, baliho, dan website sebagai strategi promosi. Promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi menekankan penggunaan berbagai media. Selain itu partisipasi dalam event dan bekerjasama dengan berbagai pihak memiliki peluang untuk memperkenalkan pariwisata.

Implementasi promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana dan optimal. Promosi dan kerjasama dilakukan secara langsung, sedangkan publikasi dan pelayanan informasi langsung dan melalui media massa. Promosi dan kerjasama dilakukan secara langsung, promosi langsung dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan dengan pemasaran. Sedangkan dalam publikasi dan pelayanan informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan publikasi dan pelayanan informasi langsung dan melalui media massa. Publikasi langsung ini disampaikan langsung kepada sasaran tetapi tergantung dari tujuan dan anggaran yang dimiliki. Biasanya publikasi semacam ini berbentuk leaflet, brosur, dapat juga berupa pameran, pekan pariwisata dll. Sedangkan publikasi melalui media massa memanfaatkan media massa untuk menyampaikan pesan ke khalayak juga ke konsumen potensial, dalam publikasi melalui media

ini biasanya berupa harian dan majalah, poster, radio, bioskop dan televisi.<sup>92</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah optimal yang dibuktikan dengan bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri telah melakukan promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi melalui berbagai media, seperti sosial media, media massa, radio, koran, baliho, dan website. Maka dapat dikatakan bahwa promosi dan kerjasama secara langsung dan publikasi dan pelayanan informasi secara langsung dan melalui media massa sudah optimal.

#### 6. Pengembangan sistem informasi

Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menghentikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pengembangan sistem informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata berupaya meningkatkan pengembangan sistem informasi melalui beragam media. Pihak kecamatan juga

---

<sup>92</sup> Mayasari D, "Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Pulau Derawan (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Berau Kalimantan Timur Dalam Upaya Menjadikan Pulau Derawan Sebagai Tujuan Wisata)." (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

<sup>93</sup> Arsito Kuncoro, "Pengembangan Sistem Informasi," S1 Teknik Informatika (S.Kom) Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2022.

memiliki peran dalam pengembangan informasi wisata, tidak hanya melalui media sosial tetapi juga melalui sosialisasi. Namun memerlukan langkah strategis dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan sistem informasi untuk pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.

Implementasi pengembangan sistem informasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana dan optimal. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui kategori sistem informasi berbasis web atau sistem informasi berbasis internet. Sistem informasi berbasis web atau sistem informasi berbasis internet adalah suatu sistem informasi yang menggunakan teknologi web atau internet untuk mengelola, menyimpan, dan memproses data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berinteraksi dengan sistem melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, tablet, atau ponsel cerdas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri mengembangkan sistem informasi melalui berbagai media yang melibatkan platform-platform penting. Sistem ini memanfaatkan platform sosial media sebagai salah satu saluran utama untuk menyediakan informasi, berinteraksi dengan pengguna, dan memfasilitasi berbagai kegiatan.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita

pengembangan sistem informasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah optimal yang dibuktikan dengan bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri telah melakukan pengembangan system informasi melalui beragam media. Maka dapat dikatakan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis web atau sistem informasi berbasis internet sudah optimal.

#### 7. Pelaksanaan *branding* dan penetapan *tagline*

*Branding* adalah kegiatan membangun sebuah *brand*. Membuat identitas, termasuk logo, merupakan salah satu kegiatan *branding*. *Branding* adalah proses mendesain, merencanakan, dan mengkomunikasikan nama serta identitas dengan tujuan pembangunan atau mengelola reputasi.<sup>94</sup> Sedangkan *tagline* adalah slogan atau frase singkat yang sering digunakan oleh sebuah perusahaan atau merek untuk mempromosikan atau mengkomunikasikan nilai-nilai inti atau pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pelanggan atau masyarakat luas.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pelaksanaan branding dan penetapan tagline Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran setelah peluncuran tagline yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai strategi branding pariwisata Kabupaten Kediri belum terlaksana secara menyeluruh karena

---

<sup>94</sup>Anholt S, *Brand New Justice. The Upside Of Global Branding* (London: Butterworth-Heinemann, 2003).

<sup>95</sup>Anindya, "Tagline: Pengertian, Fungsi, Manfaat Dan Peranan Dalam Strategi Pemasaran," idmetafora, 2023.

terdapat beberapa kendala. Penetapan tagline tersebut bertujuan untuk menciptakan destinasi berbasis budaya yang keberlanjutan. "Kediri Berbudaya" merupakan tagline sebagai strategi branding pariwisata di tingkat kabupaten, selain itu terdapat tagline sebagai branding di tingkat desa namun tetap terhubung dengan branding kabupaten.

Implementasi pelaksanaan *branding* dan penetapan *tagline* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran belum optimal. Pelaksanaan branding menggunakan *geographic branding* untuk mempromosikan daerah wisata, karena *branding* yang digunakan berdasarkan keunikan daerah tertentu.<sup>96</sup> *Geographical Branding* merupakan salah satu upaya pemasaran yang menonjolkan keindahan dan keunikan suatu tempat atau daerah kepada masyarakat yang lebih luas.<sup>97</sup> Sedangkan pelaksanaan *tagline* menggunakan jenis *tagline* spesifik untuk mempromosikan keunggulan yang ditawarkan dibandingkan dengan lainnya.<sup>98</sup> *Tagline* spesifik menonjolkan satu keunggulan utama dari produk atau *brand* yang bersangkutan. Nah, satu hal utama itulah yang membedakan *brand* tersebut dari kompetitor.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Rena Widyawinata, "7 Jenis Branding Untuk Menyukseskan Strategi Marketing Bisnismu," Glints App, 2022.

<sup>97</sup> Ayu Lusiani, "Geographical Branding," ukmindonesia, 2022, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/geographical-branding>.

<sup>98</sup> Ahmad Nur Ubaidah, "Definisi Dan Jenis-Jenis Tagline Dalam Dunia Digital Marketing," Logique, 2021.

<sup>99</sup> "Tagline Adalah: Definisi, Jenis, Dan Contoh Tagline Menarik," biteship, 2023, <https://biteship.com/blog/definisi-tagline-dan-contoh-menarik/>.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita pelaksanaan *branding* dan penetapan *tagline* oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran masih kurang optimal yang dibuktikan dengan pelaksanaan *branding* dan *tagline* pariwisata Kabupaten Kediri belum terlaksana di seluruh destinasi wisata. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *branding* dan penetapan *tagline* menggunakan *geographic branding* dengan *tagline* spesifik dalam implementasinya belum optimal.

#### 8. Pendataan kunjungan

Pendataan kunjungan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi terkait jumlah kunjungan, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang aktivitas wisata atau kunjungan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pendataan kunjungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran melaksanakan pendataan menggunakan formulir yang dikirimkan melalui whatsapp admin desa wisata. Namun, dalam pendataan kunjungan di destinasi wisata yang dapat dinikmati secara gratis menghadapi kendala dalam pengumpulan data. Sedangkan pendataan kunjungan di destinasi wisata yang berbayar menerapkan pengisian data untuk setiap pengunjung. Proses pendataan dilakukan

dengan laporan data kunjungan secara berkala kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Implementasi pendataan kunjungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran belum optimal. Pendataan pengunjung di destinasi wisata masih menggunakan metode manual menggunakan media kertas dan juga prediksi. Pendataan manual menggunakan media kertas adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara tradisional, di mana informasi dicatat dan disimpan pada dokumen kertas. Pendataan menggunakan prediksi mengacu pada penggunaan metode prediksi atau perkiraan untuk memperoleh data atau informasi tertentu tanpa harus melakukan survei atau pengumpulan data secara langsung.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita pendataan kunjungan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran masih kurang optimal yang dibuktikan dengan pendataan kunjungan dilakukan oleh pengelola wisata belum terorganisir dengan baik, sehingga data kunjungan secara keseluruhan belum diketahui secara pasti. Pendataan yang menggunakan media kertas dan prediksi menjadi kendala karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pendataan. Maka dapat dikatakan bahwa pendataan pengunjung menggunakan metode manual menggunakan media kertas dan juga prediksi belum optimal.

## 9. Penyelenggaraan *event*

Simanjuntak mendefinisikan *event* sebagai salah satu bagian dari daya tarik wisata yang memperlihatkan keindahan dan keunikan adat, budaya, kondisi geografi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan dipersiapkan dengan tujuan untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum. *Event* berfungsi sebagai salah satu kekuatan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk menarik para wisatawan berkunjung dan *event* dapat menciptakan persepsi pada pengunjung sehingga dapat menstimulus keputusan berkunjung wisatawan ke suatu daerah.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait penyelenggaraan *event* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran menggelar beberapa *event*, termasuk Pesona Wastra pada 27 Desember 2023, Launching Destination Branding dengan tagline baru "Kediri Berbudaya" pada 25 Maret 2023, dan merencanakan *event* Direct Promotion ke Makassar tahun 2024 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu desa juga menyelenggarakan *event* yang mewakili tradisi kearifan lokal sebagai sarana pemasaran pariwisata.

Implementasi penyelenggaraan *event* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana namun belum optimal. Penyelenggaraan *event* dilakukan dengan jenis *event*

---

<sup>100</sup>Lailatus Sa'diya and Nurita Andriani, "Peran City Branding Dan Event Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan," *Kompetensi* 12, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4961>.

*launching, event launching* atau peluncuran acara merupakan momen untuk memperkenalkan suatu produk, layanan, atau campaign kepada khalayak.<sup>101</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita penyelenggaraan *event* oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran masih kurang optimal yang dibuktikan dengan minimnya *event* untuk pemasaran pariwisata. Selain itu, desa juga mengadakan *event* untuk mendukung pemasaran pariwisata. Penyelenggaraan berbagai *event* sebagai strategi dalam mempromosikan sektor pariwisata. Maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan *event* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran belum optimal.

#### 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan atau program. Sudah kamu laporan adalah sarana untuk informasi dari pertanggungjawaban pelaksanaan program.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ke

---

<sup>101</sup> Kirana Adhirajasa, "Launching Event," Kirana Adhirajasa, 2023.

<sup>102</sup> Andi Ni'mah Sulfiani and Ulfa, "Pelaksanaan Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi Program Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo," *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 3* (2018).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi setiap bulan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di tingkat desa sebagai media untuk berkomunikasi secara teratur untuk memastikan kelancaran dan pemenuhan kebutuhan destinasi wisata.

Implementasi monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana dan optimal. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa laporan berkala yang dibuat secara periodik dalam jangka waktu satu bulan. Laporan berkala adalah suatu bentuk laporan yang disiapkan dan disajikan secara periodik, biasanya dalam interval waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Tujuan dari laporan berkala adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang teratur tentang perkembangan atau kinerja suatu kegiatan, proyek, organisasi, atau aspek lain dalam jangka waktu tertentu. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan dengan membaca dokumentasi laporan, berupa ringkasan kinerja dan laporan perkembangan dari lembaga ataupun instansi tersebut.<sup>103</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah optimal yang dibuktikan dengan bidang

---

<sup>103</sup> Dinda Hafid Hafifah, "Monitoring Adalah Proses Menganalisa Informasi Secara Sistematis, Ketahui Dampak Dan Bentuknya," *Liputan 6*, 2023.

pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri telah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi setiap bulan. Maka dapat dikatakan bahwa monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa laporan berkala yang dibuat secara periodik sudah optimal.

#### 11. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha

Tata usaha adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yakni urusan tulis-menulis (termasuk hal keuangan dan sebagainya) dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan juga negara. Pada hakekatnya administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Puspita Dwi terkait pelaksanaan administrasi dan tata usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata setiap bulan menjalankan rutinitas administrasi dan tata usaha sebagai bagian operasional bulanan.

Implementasi pelaksanaan administrasi dan tata usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah terlaksana dan optimal. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha berbasis operasional. Administrasi dan tata usaha berbasis operasional merujuk pada aspek pengelolaan dan organisasi yang berkaitan

---

<sup>104</sup>Adek Siti Nurhalizah, "Administrasi Tata Usaha," *Administrasi Tata Usaha*, 2019.

dengan pelaksanaan operasional sehari-hari dalam suatu entitas, baik itu organisasi, lembaga, atau perusahaan.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita pelaksanaan administrasi dan tata usaha oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran sudah optimal yang dibuktikan dengan bidang pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri telah melakukan keteraturan dan kedisiplinan dalam pengelolaan aspek administratif di sektor pariwisata untuk meningkatkan kelancaran operasional dan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan administrasi dan tata usaha berbasis operasional sudah optimal.

### **C. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah***

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>105</sup> Lingkungan menurut Otto Soemarwoto dalam buku “Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan” menjelaskan lingkungan adalah ruang yang menempati

---

<sup>105</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 71 Halaman.

suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya yang menempati ruang tertentu. Sedangkan dalam Kamus Ekologi lingkungan yaitu bagian dari keseluruhan yang berhubungan satu sama lain. Selain itu lingkungan juga berkaitan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Keseluruhan tersebut berada secara alami di bumi dan daerah-daerah lainnya.<sup>106</sup>

Lingkungan berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alami secara dinamis, artinya tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alami terdiri dari atas sumber-sumber alami berupa ekosistem dan berbagai komponen yang ada baik itu komponen fisik maupun biologis. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Jenis lingkungan yang dibuat oleh manusia ditujukan untuk memenuhi manfaat yang sangat baik bagi manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya.<sup>107</sup>

Salah satu bentuk pengembangan objek wisata adalah wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah berupa tradisi budaya yang mempertahankan keseimbangan hidup dengan lingkungan alam. Keseimbangan itu tercermin dari berbagai bentuk

---

<sup>106</sup> Hutan, "Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat."

<sup>107</sup> Hutan.

pengetahuan, adat istiadat, upacara tradisional dan kepercayaan yang berhubungan alam dan daur hidup manusia yang berlangsung turun-temurun. Dalam perwujudannya, wisata alam berbasis kearifan lokal merupakan salah satu bentuk yang dikembangkan dalam ekowisata.

Karena dalam ekowisata berbagai kearifan lokal seperti pelestarian lingkungan alam, pengetahuan tentang gejala-gejala alam dan lingkungan fisik, pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman manfaat, dan pembudidayaannya, serta pelestarian adat istiadat masyarakat lokal dan bentuk kearifan lokal lainnya merupakan unsur-unsur yang harus dipertahankan dan menjadi daya tarik wisata.<sup>108</sup> Dalam pelestarian destinasi wisata budaya, tugas dilakukan oleh pengelola dari pemerintah yang diwakili oleh juru pelihara serta masyarakat umum yang diwakili oleh relawan. Keduanya tetap memegang erat kebudayaan sebagai fokus pelestarian.

Kehadiran *Fiqh Bī'ah* untuk memberikan penjelasan kepada manusia bagaimana tata aturan perilaku dan sikap seorang muslim dalam menjaga dan menghadapi persoalan lingkungan sekitar. Konsep lingkungan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan komprehensif dalam jiwa untuk mengendalikannya.<sup>109</sup> Persoalan lingkungan hidup tidak sampai hanya pada permasalahan pencemaran, sampah, penanaman kembali atau sekedar pelestarian alam, namun lebih dari itu seluruh permasalahan lingkungan hidup termasuk dalam ruang

---

<sup>108</sup>Anwar et al., "Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan."

<sup>109</sup>Nasution, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan."

lingkup suatu pemahaman hidup. Ali Yafie dalam perumusan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup bersumber dari larangan berbuat kerusakan yang berseumber dari Al-Qur`an dan Hadist diantaranya: Q.S Al-Baqarah Ayat 12, Ayat 30, Ayat 205. Ayat 220, Ayat 251, Q.S Al-Maidah (5) Ayat 64, Q.S Al-A`raf (7) Ayat 74, Ayat 85, Ayat 86, Ayat 103, Ayat 127, Ayat 142, Q.S Yunus (10) Ayat 40, Ayat 81, Ayat 91, Q.S Hud (11) Ayat 85, Q.S Yusuf (12) Ayat 73 dll.<sup>110</sup>

Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-bī'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dharuriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara/rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.<sup>111</sup> Bidang pemasaran telah melimpahkan kewenangan kepada bidang pengembangan dalam perspektif *Fiqh Bī'ah*, dikarenakan tidak sejalan dengan fungsi khusus yang dimiliki oleh bidang pemasaran.

#### 1. Hifdh al-Nafsh

Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia yang sudah menjadi kenyataan sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mentalnya. Jiwa, raga, dan kehormatan yang sudah harus diselamatkan dan dilindungi. Perlindungan hukum untuk menjamin jiwa, raga, dan kehormatan

---

<sup>110</sup>Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

<sup>111</sup>Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terj A. Hakim Shah, Dkk.*

manusia telah diberikan secara dini sejak manusia berada dalam rahim ibu pada fase awal kehidupan manusia dimulai.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait *hifdh al-nafsh* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata yang sudah berjalan menekankan keseimbangan kesejahteraan dan pembinaan jiwa dan raga untuk menjaga semangat dalam pengelolaan wisata. Berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan kebugaran jasmani dilaksanakan untuk pemenuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan jiwa dan raga pengelola maupun wisatawan. Pengelolaan destinasi wisata memiliki tujuan memberikan penyegaran, baik secara jiwa maupun raga untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan.

Implementasi *hifdh al-nafsh* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Ajaran Islam memperkenalkan suatu prinsip-prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia diantaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafsh*. Ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin

---

<sup>112</sup>Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

karena keterbatasannya sesuai dengan prinsip kehidupan alam dunia baik dari segi waktu maupun ruang.<sup>113</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita *hifdh al-nafsh* oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan pemahaman akan pentingnya aspek jiwa dan raga juga tercermin dalam pengelolaan destinasi wisata. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata dan Karang Taruna memberikan pemenuhan menyeluruh terhadap kebutuhan jiwa, raga, dan penghormatan. Aspek rohani dan jasmani dalam pengelolaan destinasi wisata sangat diperhatikan dalam berbagai kegiatan dan fasilitas yang tersedia di tempat wisata. Dalam pengelolaan destinasi wisata, tidak hanya memperhatikan aspek jiwa dan raga, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap alam semesta dan mengakomodir nilai-nilai budaya. Maka dapat dikatakan bahwa *hifdh al-nafsh* dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

## 2. Wasilah

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan, yaitu kehidupan manusia di alam nyata di muka bumi dan kehidupan lain yang diperkenalkan oleh ajaran Islam adalah kehidupan *ukhrawi* di *'alam al-ghaib*. Berarti bahwa manusia tidak boleh bertindak

---

<sup>113</sup> Yafie.

sekehendak hatinya kau mau mengikuti kecenderungannya merenggut kenikmatan duniawi tanpa batas.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait wasilah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata memiliki orientasi yang mencakup aspek keagamaan dan kehidupan akhirat. Dapat dilihat dalam pengelolaan destinasi wisata menyoroti dimensi multi-pariwisata, termasuk wisata religi yang disertai dengan doa sebagai pengarah spiritual. Selain itu fasilitas beribadah sebagai wujud pentingnya memasukkan orientasi ke akhirat dalam pengelolaan destinasi wisata. Penekanan orientasi ke akhirat dalam pengelolaan destinasi wisata dengan dilaksanakan kegiatan keagamaan sebagai ungkapan syukur makhluk kepada Tuhan.

Implementasi wasilah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Ajaran Islam memperkenalkan kehidupan dunia bukan tujuan, kehidupan dunia tidak kekal dan tidak abadi. Kehidupan dunia adalah titian menuju kehidupan akhirat yang kekal. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upaya memperoleh ridho Allah di alam akhirat kelak.<sup>115</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita wasilah oleh

---

<sup>114</sup>Yafie.

<sup>115</sup> Yafie.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan pengelolaan destinasi wisata diwujudkan dengan adanya fasilitas tempat ibadah sebagai orientasi ke nilai-nilai spiritual dan kehidupan akhirat. Diintegrasikan dalam setiap aspek pengelolaan destinasi wisata, mencakup doa, tasyakuran, dan kegiatan keagamaan. Dalam pengelolaan destinasi wisata bersifat transendental, tujuannya adalah mencapai kehidupan di akhirat dengan mendapatkan ridho Tuhan. Ini merupakan ungkapan syukur makhluk kepada Pencipta melalui kehidupan di dunia. Maka dapat dikatakan bahwa wasilah dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

### 3. Hadd al-Kifayah

Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia. Melampaui takaran di sini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar. Jika hal ini terjadi, melambangkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi ini yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Yafie.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait hadd al-kifayah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata menegaskan pentingnya mengelola potensi lokal dan destinasi wisata sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan destinasi wisata yang memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya desa telah disesuaikan dengan kebutuhan, pemanfaatan potensi yang ada agar destinasi dapat menarik perhatian wisatawan, namun dalam pengembangannya belum optimal. Pengelolaan destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi lokal dan penyesuaian dengan kebutuhan, menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi hadd al-kifayah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Bersumber dalam Al-Quran tentang apa yang harus dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengelola apa yang ada dalam alam ini untuk dapat dinikmati dengan sewajarnya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta tanpa menimbulkan kerusakan.<sup>117</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita hadd al-

---

<sup>117</sup> Yafie.

kifayah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan pengelolaan destinasi wisata sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Namun pemanfaatan potensi lokal dan kearifan lokal belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pengelolaan destinasi wisata, meskipun telah memperhatikan kebutuhan masyarakat, terdapat destinasi yang pengelolaannya bersifat personal, sehingga pemanfaatannya untuk masyarakat belum optimal. Maka dapat dikatakan bahwa hadd al-kifayah dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

#### 4. Muthabaqoh dan Tawazun

Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Keselarasan dan keseimbangan seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait muthabaqoh dan tawazun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang

---

<sup>118</sup>Yafie.

pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan keseimbangan ekosistem dalam pengelolaan destinasi wisata. Mereka menunjukkan kesadaran akan perlunya melibatkan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pengembangan pariwisata. Langkah-langkah konkret seperti larangan-larangan tertentu, kegiatan penghijauan, hingga gerakan pembersihan lingkungan sekitar menjadi bukti komitmen mereka terhadap keseimbangan ekosistem. Para informan mengilustrasikan praktik nyata dalam menjaga keberlanjutan dan harmoni ekosistem dalam konteks pengelolaan destinasi wisata.

Implementasi muthabaqoh dan tawazun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Dalam pandangan Islam, hanyalah Allah SWT yang berhak menaklukkan alam semesta, sebaliknya manusia harus memperlakukan alam dengan segenap kehidupan yang ada di dalamnya secara akrab, dan menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya. Dalam kaitan ini pula manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan oleh SWT, telah ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi ini. *Khalifah* mengandung arti sebagai pemelihara atau tegasnya manusia telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara,

dan memberdayakan alam semesta, bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.<sup>119</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita muthabaqoh dan tawazun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan pengelolaan destinasi wisata sangat memperhatikan keselarasan dan keseimbangan ekosistem, mengintegrasikan keberlanjutan pariwisata. Pengelolaan destinasi wisata tidak hanya terpaku pada pariwisata berkelanjutan, melainkan menekankan pada pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Maka dapat dikatakan bahwa muthabaqoh dan tawazun dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

##### 5. Muhtaram

Siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu. Semua makhluk adalah mulia. Dalam fiqih terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi hak kepri-adaannya.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait muhtaram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan

---

<sup>119</sup> Yafie.

<sup>120</sup> Yafie.

dalam pengelolaan destinasi wisata menegaskan pentingnya memperhatikan eksistensi seluruh makhluk dalam konteks pengelolaan destinasi wisata. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan keagamaan, budaya, dan kearifan lokal. Mereka mencerminkan sikap hormat dan perhatian terhadap keberadaan makhluk fisik dan non-fisik. Selain itu dalam pengelolaan destinasi wisata menunjukkan kesadaran terhadap keberagaman makhluk dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Adanya larangan menembak dan ritual-ritual tertentu di lokasi-lokasi wisata menjadi wujud nyata dari komitmen untuk melestarikan eksistensi seluruh makhluk.

Implementasi muhtaram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Semua makhluk mulia merupakan bukti penciptaan Tuhan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam pengelolaannya, terdapat penghormatan kepada makhluk Tuhan yang bersifat non-fisik melalui ritual doa sebagai tindakan menghargai dan menghormati. Selain itu, dilakukan reboisasi tanaman setelah terjadi penebangan. Islam mengajarkan tidak boleh memperlakukan secara semena-mena sekalipun terhadap makhluk yang tak bernyawa, yakni benda-benda alam bukan manusia atau hewan. Sebagaimana makhluk lainnya benda-benda alam yang tak bernyawa ini juga memiliki status hukum *muhtaram*. Menurut ketentuan fiqh, sang pemilik benda-benda berkewajiban membiayai

perawatan atas benda-benda miliknya itu. Hal ini merupakan gambaran tentang status hukum *muhtaram* yang melekat pada setiap jenis makhluk, dalam pandangan ilmu fiqh.<sup>121</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita muhtaram oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan eksistensi seluruh makhluk, baik makhluk fisik dan non fisik, menjadi perhatian dalam pengelolaan destinasi wisata. Eksistensi seluruh makhluk tercermin dalam upaya menjaga lingkungan, kesopanan, dan penghormatan terhadap makhluk non fisik. Ajaran fiqh tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak seorangpun berhak membunuh sewenang-wenang (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti, dan menyiksa. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliakan kepriadaan. Maka dapat dikatakan bahwa muhtaram dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

## 6. Mukallaf

Segala tindakan akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada

---

<sup>121</sup> Yafie.

pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram*. Manusia memperoleh kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan baik atas dirinya maupun atas lingkungannya.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait mukallaf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan dalam pengelolaan destinasi wisata menekankan pentingnya orientasi pada pariwisata berkelanjutan dengan fokus utama pada pelestarian lingkungan dan konservasi. Dalam pengelolaan destinasi, pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Pelestarian lingkungan diintegrasikan dalam program-program tahunan dan diwujudkan melalui tindakan konkret seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah. Semua tindakan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan destinasi wisata alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Implementasi mukallaf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembang sudah terlaksana dan optimal. Manusia mempunyai martabat yang sangat mulia disertai dengan jaminan perlindungan hukum yang berimbang dengan penugasannya. Semuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia. Ini menjadikan

---

<sup>122</sup>Yafie.

manusia menempati kedudukan yang luhur, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya dan fungsional terhadap kelangsungan hidup alam ini (terjadinya ekosistem yang seharusnya).<sup>123</sup>

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa realita mukallaf oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah optimal yang dibuktikan dengan pengelolaan destinasi wisata dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjaga keindahan alam dan kesejahteraan masyarakat setempat. Orientasi wisata berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pengelolaan destinasi, memastikan keberlanjutan, konservasi, dan pelestarian lingkungan. Setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan destinasi wisata, sangat ditekankan pelestarian lingkungan sebagai wujud tanggungjawab makhluk kepada Tuhan secara vertikal. Secara horizontal, fokus pada kemaslahatan masyarakat dan pertanggungjawaban secara administratif. Maka dapat dikatakan bahwa mukallaf dalam pengelolaan destinasi wisata sudah optimal.

---

<sup>123</sup> Yafie.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata terhadap implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri masih belum optimal. Perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan, pelaksanaan kebijakan kerjasama, pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata, promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi, pengembangan sistem informasi, pelaksanaan branding dan penetapan tagline, pendataan kunjungan, penyelenggaraan event, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan tata usaha dapat disimpulkan bahwa meskipun sejumlah kegiatan telah terlaksana, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Terdapat kendala dalam perumusan kebijakan yang bersifat sentralistik, minimnya koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan, belum terdapat pedoman dalam pengiriman dan penerimaan widyawisata, pelaksanaan branding dan penetapan tagline yang belum merata, serta pendataan kunjungan yang menggunakan metode manual dan

prediksi, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Bidang Pemasaran Pariwisata untuk mencapai tujuan optimal dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kediri.

2. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pemasaran pariwisata dalam pelestarian destinasi wisata budaya di Kabupaten Kediri perspektif *Fiqh Bī'ah* sudah sesuai dengan perspektif *Fiqh Bī'ah* Ali Yafie, namun terdapat keterputusan koordinasi antara bidang pemasaran dan bidang pengembangan pariwisata. Implementasi konsep-konsep *Fiqh Bī'ah*, yang meliputi *hifdh al-nafsh*, *wasilah*, *hadd al-kifayah*, *muthabaqoh* dan *tawazun*, *muhtaram*, *mukallaf* dalam pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang pengembangan sudah terlaksana secara optimal. Dalam upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan destinasi wisata mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, agama, dan budaya. Penekanan pada pemeliharaan lingkungan, penghargaan terhadap eksistensi makhluk, dan pertanggungjawaban manusia dalam mengelola alam menegaskan komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pandangan agama Islam.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri merumuskan kebijakan penerapan melalui pendekatan komunikasi *bottom-up*, pembinaan secara intensif dalam promosi untuk pemasaran pariwisata, meningkatkan kerjasama dalam pemasaran pariwisata, penyediaan pedoman secara umum dalam penyelenggaraan serta pengiriman dan menerima widyawisata, optimalisasi media sosial dalam pelaksanaan promosi yang lebih interaktif, pelaksanaan tagline secara menyeluruh, dan memanfaatkan teknologi untuk pendataan kunjungan wisatawan guna efisiensi dan akurasi yang lebih baik.
2. Hendaknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengatur jalur koordinasi yang integratif antara bidang pemasaran dan bidang pengembangan pariwisata dengan tetap mempertahankan serta mendorong peningkatan pengelolaan destinasi wisata yang sejalan dengan kearifan lokal dan *Fiqh Bi'ah* Ali Yafie.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Adam, Nurul Farha Hi, Cynthia E V Wuisang, and Johansen C Mandey. "Analisis Potensi Wisata Budaya Di Kota Ternate Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Perkotaan." *Spasial* 6, no. 3 (2019).
- Adhirajasa, Kirana. "Launching Event." Kirana Adhirajasa, 2023.
- Adisurya, Canda. "Bupati Kediri Ajak Berbudaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk Selaraskan Tagline Kediri Berbudaya." *Times Indonesia*, 2023.
- Akmaluddin. "Konvergensi Ekolinguistik Dan Fiqh Bi'ah Dalam Pelestarian Lingkungan." *El-Tsaqofah (Jurnal Jurusan PBA)*, no. 2 (2020).  
<https://doi.org/10.20414/tsaqofah.v19i2.2623>.
- Anggara, Desprio, and Rury Febrina. "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Tradisi Randai Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017." *JOM FISIP* 8 (2017).
- Anindya. "Tagline: Pengertian, Fungsi, Manfaat Dan Peranan Dalam Strategi Pemasaran." *idmetafora*, 2023.
- Anwar, M. Arief, Gusti Syahrani, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, and Wajidi. "Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 2 (2018).
- Apriani, Gradila. "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pelestarian Budaya Dan Pengembangan Pariwisata." *Fokus* 1, no. 15 (2017).
- Asyrofah, Salma. "Ekowisata: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Biah." *Suara Muhammadiyah*, 2021.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- biteship. "Tagline Adalah: Definisi, Jenis, Dan Contoh Tagline Menarik," 2023.  
<https://biteship.com/blog/definisi-tagline-dan-contoh-menarik/>.
- Budiman, Shahril, Chindy Claudhia, and Edward Mandala. "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Di Pulau Penyengat." *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* 2, no. 2 (2022).
- D, Mayasari. "Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Pulau Derawan (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Berau Kalimantan Timur Dalam Upaya Menjadikan Pulau Derawan Sebagai Tujuan Wisata)." Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2014.

- Davidson, Rob, and Robert Maitland. *Tourism Destinations*. London: Hodder and Stoughton, 1997.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0047287598037001117>.
- Eddyono, Fauziah. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Farantika, Iis Hermaeny. "Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten." Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Febriyandi, Didi. "Proses Perumusan Kebijakan Pemerkan Daerah (Studi Di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara) Didi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 2 (2016).
- Fitriana, Yusuf Adam Hilman, and Bambang Triono. "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>.
- Ghazali, M Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Hafifah, Dinda Hafid. "Monitoring Adalah Proses Menganalisa Informasi Secara Sistematis, Ketahui Dampak Dan Bentuknya." *Liputan* 6, 2023.
- Hartaman, Nursaleh, Wahyudi, Nasrullah, Yusril Has, Rezki Aitul Hukmi, Wahyu Hidayat, and Andi Ahmar Ihwal Ikhsan. "Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021).
- Hermanto, Lubis, Ariani Rosadi, and Muhsninin. "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Lokal Di Kota Bima." *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2019).
- Hutan, Lindungi. "Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis Dan Manfaat." 2022. Accessed February 27, 2024.  
<https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>.
- Janice, Astrella. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Bpmd ) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau." *Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2015).
- Kab Kediri, Pemerintah. "Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan," n.d.
- . "Peta Wilayah Kabupaten Kediri," n.d.

- Kabupaten Kediri, Badan Pusat Statistik. “Jumlah Objek Wisata Di Kabupaten Kediri Menurut Jenisnya Dan Kecamatan 2020-2022.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, n.d.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.
- Kediri, Dinas Kominfo Kab. “Grebek Sampah, Tanamkan Budaya Hidup Bersih.” [berita.kedirikab.go.id](http://berita.kedirikab.go.id), 2023.  
<https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/03/grebek-sampah-tanamkan-budaya-hidup-bersih>.
- . “Simpang Lima Gumul Raih Penghargaan East Java Tourism Award (EJTA) 2023 Kategori Daya Tarik Wisata Buatan.” *Seputar Kediri*, 2023.  
<https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/10/simpang-lima-gumul-raih-penghargaan-east-java-tourism-award-ejta-2023-kategori-daya-tarik-wisata-buatan#:~:text=Kabupaten Kediri sendiri untuk East,Pojok sebagai nominator kategori daya>.
- Kila, Jimmy Arnold, Ventje Kasenda, and Gustaf Undap. “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara)” 3, no. 1 (2023).
- Kuncoro, Arsito. “Pengembangan Sistem Informasi.” S1 Teknik Informatika (S.Kom) Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2022.
- Kurnia, Ita. “Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2019).
- Kurniangsih, Dewi, Agus Subagyo, and Agustina Setiawan. “Penyusunan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, no. 1 (2016).
- Kustari, Yuyu Eka, Hanny Purnamasari, and Sopyan Resmana Adiarsa. “Koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang Dalam Melayani Permohonan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.” *Kinerja* 18, no. 3 (2021).
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (n.d.).
- Lestari, Sri Ayu, and Ismail Tolla. “Pelaksanaan Tupoksi Layanan Tenaga Administrasi Sekolah Di Sma Negeri 1 Makassar.” *Jurnal Administrasi, Kebijakan Dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]* 2, no. 1 (2021).
- Lusiani, Ayu. “Geographical Branding.” *ukmindonesia*, 2022.  
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/geographical-branding>.

- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum. LPPM Universitas Bung Hatta*. Vol. 2. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Marsheilla, Alycia. “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal.” Universitas Islam “\$%,” 2022.
- Moekijat. *Analisis Jabatan*. Cetakan VI. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Mufid, Moh. “Fikih Ekowisata Berbasis Maqasid Syariah: Studi Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove Di Wonorejo Kota Surabaya.” *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2213>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Ahsin Sakho, Husein Muhammad, Roghib Mabur, Sudirman Ahmad Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kabal, Pasha, and Martha Andriana. *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi`ah)*. Jakarta: Konvergensi International Indonesia, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Saipul. “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 02 (2015).
- Ngatu, Ferdynand. “Analisis Kebijakan Desa Mandiri Anggur Merah Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Di Provinsi Ntt.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 5, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.15-28>.
- Nurhalizah, Adek Siti. “Administrasi Tata Usaha.” *Administrasi Tata Usaha*, 2019.
- P, Desi Permatasari. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran.” *Moderat* 4 (2018).
- Prakoso, Fahmi Febri. “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember.” Universitas Jember, 2018.
- Prastiyanti, Dinda Puspa, and Yulianto. “Media Promosi Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan.” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 2, no. 2 (2019).
- Pratama, Luzian, Nurmala Sari, Deni Pranata, Nurus Shalihin, Welhendri Azwar, and M Yusuf. “Analisis Bibliometrik: Kajian ‘Fasilitas’ Dalam Isu Pemberdayaan.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (2023).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14268>.

- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terj A. Hakim Shah, Dkk.* Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002.
- Rahaja, Algons D.B. “Koordinasi: Pengertian Menurut Para Ahli, 3 Tujuan, Jenis, Serta Beberapa Contohnya.” *Ekrut Media*, 2022.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research).” *Mahosi* 02 (2021).
- Rohman, Syifa Fauzia, Dadan Kurniansyah, and Rachmat Ramdani. “Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Kampung Budaya Di Kabupaten Karawang.” *Moderat* 7, no. November (2021).
- Romadhan, Mohammad Insan, Anggraeny Puspaningtyas, and Dida Rahmadanik. “Proses Komunikasi Dalam Pelestarian Budaya Saronen Kepada Generasi Muda.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan* 20, no. 1 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31346/jpikom.v20i1.1650>.
- S, Anholt. *Brand New Justice. The Upside Of Global Branding*. London: Butterworth- Heinemann, 2003.
- Sa’diya, Lailatus, and Nurita Andriani. “Peran City Branding Dan Event Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan.” *Kompetensi* 12, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4961>.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Ekonomi* 21, no. 3 (2019).
- Satria, Andri. “Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Cagar Budaya Di Kabupaten Kuantan Singingi.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Setyanto, Yugih, and Septia Winduwati. “Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi Pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat).” *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1077>.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Cetakan Sa. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Sulfiani, Andi Ni’mah, and Ulfa. “Pelaksanaan Pelaporan Monitoring Dan

- Evaluasi Program Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo.” *Prosiding Seminar Hasil Penelirian* 3 (2018).
- Syahriwana, Sri Nurwaliyuni, and Jayadi Nas. “Hubungan Budaya Lokal Dalam Pelayanan Pemerintahan Di Kabupaten Tana Toraja.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2014).
- Tasik, Vidi Ravael, Sarah Sambiran, and Stefanus Sampe. “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).
- Taufiqurrahman. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Cagar Budaya Istana Dalam Loka Sebagai Potensi Pariwisata Daerah.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Tina, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik. “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep” 2, no. 2 (2021).
- Triwardani, Reny, and Christina Rochayanti. “Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal.” *Reformasi* 4, no. 2 (2014).
- Ubaidah, Ahmad Nur. “Definisi Dan Jenis-Jenis Tagline Dalam Dunia Digital Marketing.” *Logique*, 2021.
- Veronika. “Sentralisasi: Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangan Serta Contohnya.” *Gramedia Blog*. Accessed February 27, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kuitansi/>.
- Wadu, Lodovikus Bomans, and Yustina Jaisa. “Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2017).
- Widiarsa. “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka.” *Media Informasi* 28, no. 1 (2019).
- Widyawinata, Rena. “7 Jenis Branding Untuk Menyukkseskan Strategi Marketing Bisnismu.” *Glints App*, 2022.
- Yafie, Ali. *Menggas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- . *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Edited by Mazuki Wahid, Helmy Ali, and Marya Ulpa. Jakarta: UFUK Press, 2006.

## LAMPIRAN

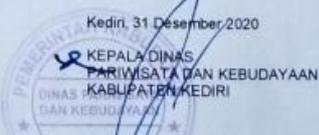
### Lampiran I : Kunjungan Wisatawan

**PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020**

NO	DAYA TARIK WISATA	Pengunjung ( Orang )		
		Wisman	Wisnus	Jumlah
<b>A</b>	<b>PEMERINTAH KAB. KEDIRI (PAD)</b>	-	-	-
1	Wisata Gunung Kelud	9	76.383	76.392
2	Wana Wisata Ubalan	-	18.869	18.869
3	Kawasan Wisata Besuki	-	17.588	17.588
4	Wana Wisata Sumber Podang	-	8.434	8.434
5	Taman Ria Corah	-	3.805	3.805
6	Kawasan Wisata Surowono	-	3.766	3.766
	<b>JUMLAH A</b>	<b>9</b>	<b>128.845</b>	<b>128.854</b>
<b>B</b>	<b>PEMERINTAH KAB. KEDIRI (NON PAD)</b>	-	-	-
7	Simpang Lima Gumul	-	132.984	132.984
	<b>JUMLAH B</b>	-	<b>132.984</b>	<b>132.984</b>
<b>C</b>	<b>SWASTA</b>	-	-	-
8	Kawasan Wisata Pohsarang	-	20.098	20.098
9	Bendung Gerak Waru Turi	-	26.877	26.877
10	Gumul Paradise Island Waterpark	-	18.491	18.491
11	Kampung Inggris Pare	-	19.610	19.610
12	Agrwisata Sepawon	-	-	-
13	Kampung Luwak	-	-	-
14	Kediri Waterpark	-	19.431	19.431
15	Ndalem Pojok Situs Bung Karno	-	290	290
16	Kampung Anggrek SSP	-	35.436	35.436
17	Bukit Doho Indah (BDI)	-	32.338	32.338
18	Kerea Fantasy	-	15.977	15.977
19	DOSH ( Dadapan One Stop Holiday)	-	-	-
20	Marwah Tirta & Resto (1,2,3)	-	8.796	8.796
21	Kampung Indian	-	45.020	45.020
22	Meita Waterland	-	11.363	11.363
	<b>JUMLAH C</b>	-	<b>253.727</b>	<b>253.727</b>
<b>D</b>	<b>DESA WISATA</b>	-	-	-
23	Desa Wisata Jambu	7	65.848	65.855
24	Desa Wisata Medowo	-	10.454	10.454
25	Desa Wisata Ngadi	-	28.983	28.983
26	Desa Wisata Jugo	-	3.778	3.778
27	Desa Wisata Joho	-	144	144
28	Desa Wisata Tawang	-	2.932	2.932
29	Sumber Sugih Waras	-	21.640	21.640
30	Gronjong Wanti	-	27.539	27.539
31	Wisata Sumber Jembatan	-	55.430	55.430
32	Wisata Alaska ( Alas Karetan)	-	90.700	90.700
33	Wisata Pancar Wonotirto	-	19.674	19.674
34	Kampung Labu	-	2.532	2.532
35	Kawasan Wisata Sri Aji Jayabaya	-	41.665	41.665
	<b>JUMLAH D</b>	<b>7</b>	<b>371.319</b>	<b>371.326</b>
<b>E</b>	<b>CAGAR BUDAYA</b>	-	-	-
36	Situs Gambyok	-	288	288
37	Situs Candi Dorok	-	221	221
38	Situs Calon Arang	-	1.784	1.784
39	Situs Arca Totok Kerot	-	2.711	2.711
40	Situs Namba'an	-	267	267
41	Situs Prasasti PohSarang	-	150	150
42	Situs Candi Surowono	-	2.871	2.871
43	Situs Candi Tegowangi	-	9.514	9.514
44	Situs Semen	-	2.134	2.134
45	Situs Tondowongso	-	838	838
46	Prasasti Tangkulan	-	209	209
47	Situs Brumbung	-	219	219
48	Situs Tunglur	-	638	638
49	Situs Adan-Adan	-	172	172
	<b>JUMLAH E</b>	-	<b>22.016</b>	<b>22.016</b>
	<b>TOTAL A - E</b>	<b>16</b>	<b>908.891</b>	<b>908.907</b>

*\* Data Kunjungan sampai dengan 31 Desember 2020*

Kediri, 31 Desember 2020

  
**KEPALA DINAS  
PARISWATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEDIRI**  
 Ir. ADI SUWIGNYO, M.Si.  
 Pengetua Utama Muda  
 NIP. 19650307 199203 1 012

**DATA KUNJUNGAN WISATA DI DESTINASI WISATA**

Kabupaten Kediri  
Tahun 2021

No	Destinasi	Januari		Februari		Maret		April		Mai		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Jumlah
		Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	Worner	
1	Wisata Gunung Kelud	0	0	0	0	0	0	0	4.345	0	23.604	0	44.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.690
2	Kawasan Wisata Besuki	0	0	0	0	0	0	0	2.081	0	11.708	0	22.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.161
3	Wisata Sumber Podang	0	0	0	0	0	0	0	644	0	2.748	0	5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.360
4	Monumen SLG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.078
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.070</b>	<b>0</b>	<b>38.060</b>	<b>0</b>	<b>73.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.398</b>
<b>Jumlah Total Kunjungan Tahun 2021</b>		<b>520.398</b>																								

Keterangan: - Penutupan seluruh obyek wisata Kabupaten Kediri sejak tanggal 17 Maret 2020 sesuai Surat Edaran Bupati Kediri Nomor: 443/1021/419/2020

- Uji Coba pembukaan 3 obyek wisata dimulai tanggal 10 April 2021
- Destinasi wisata yang diuji coba dibuka antara lain: Wisata Gunung Kelud, Kawasan Wisata Besuki, dan Wisata Sumber Podang
- Destinasi wisata Monumen Simping Lima Gunung diuji coba dibuka mulai 01 November 2021
- Pemberlakuan PPKM Darurat dimulai tanggal 01 Juli 2021 sampai 30 September 2021
- Uji coba pembukaan 3 obyek wisata dimulai lagi tanggal 01 Oktober 2021
- Per 01 Desember 2021, pengelolaan Wisata Sumber Podang diserahkan ke Desa
- Sesuai Surat Edaran Sekda Kab. Kediri dilaksanakan penutupan tempat wisata tanggal 31 Desember 2021 dan 01 Januari 2022

Kediri, 03 Januari 2022

Mengalahkan,

  
**Keptala Bidang Pemasaran Pariwisata**  
 Kabupaten Kediri  
 dth. **MUNFARID, M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19651010 199202 1 004

Lampiran II : Tabel Wawancara

No	Pertanyaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Bagaimana perumusan kebijakan kepariwisataan?			
2.	Bagaimana pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata?			
3.	Bagaimana pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama pariwisata?			
4.	Bagaimana penetapan pedoman dan penyelenggaraan pengiriman atau menerima wisatawan?			
5.	Bagaimana promosi, kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi pariwisata?			
6.	Bagaimana pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata?			
7.	Bagaimana pelaksanaan branding dan penetapan tagline pariwisata?			
8.	Bagaimana pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata?			
9.	Apa saja event terkait pemasaran pariwisata?			
10.	Bagaimana monitoring, evaluasi dan pelaporan pariwisata?			
11.	Bagaimana pelaksanaan administrasi dan tata usaha			

	pariwisata?			
12.	Apakah pengelolaan destinasi wisata memperhatikan jiwa dan raga?			
13.	Apakah pengelolaan destinasi wisata ada orientasi ke akhirat?			
14.	Apakah pengelolaan destinasi wisata sesuai dengan kebutuhan?			
15.	Apakah pengelolaan destinasi wisata menjaga keselarasan dan keseimbangan ekosistem?			
16.	Apakah pengelolaan destinasi wisata memperhatikan eksistensi seluruh makhluk?			
17	Apakah pengelolaan destinasi wisata sudah memperhatikan pelestarian lingkungan?			

### Lampiran III : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 29 Desember 2023 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri



Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Kecamatan Ngasem



Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 03 Januari 2024 di Kantor Desa Tugurejo



Wawancara dengan Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial dan Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (2) Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 04 Januari 2024 di Kantor Kecamatan Wates



Wawancara dengan Bapak Darwanto selaku Kepala Desa Pojok mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 04 Januari 2024 di Kantor Desa Pojok



Wawancara dengan Ibu Siti Marwiyah selaku Juru Pelihara dan Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 04 Januari 2024 di Situs Ndalem Pojok



Wawancara dengan Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 08 Januari 2024 di Kantor Kecamatan Kepung



Wawancara dengan Bapak Ahmad Farid Arza selaku Sekretari Desa Keling dan Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata Keling mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 08 Januari 2024 di Kantor Desa Keling



Wawancara dengan Bapak M Ali Imran selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 08 Januari 2024 di Goa Jegles



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku masyarakat sekitar destinasi wisata Goa Jegles mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 08 Januari 2024 di Goa Jegles



Wawancara dengan Ibu Zulfa Arum Lestari selaku masyarakat sekitar destinasi wisata Situs Ndalem Pojok mengenai Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam Pelestarian Destinasi Wisata Budaya di Kabupaten Kediri Perspektif *Fiqh Bī'ah* pada Tanggal 09 Januari 2024 di Lapangan Karangrejo

## Lampiran IV : Hasil Wawancara

### 1. Perumusan kebijakan

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Bidang pemasaran pariwisata tidak memiliki kebijakan, namun menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, sementara misinya sejalan dengan arahan dari bupati atau kepala daerah. Bupati telah menetapkan dua misi utama untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu optimalisasi pariwisata berbasis kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan”*.<sup>124</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan pariwisata di wilayah Kecamatan Ngasem masih belum optimal sehingga perlu dikembangkan lagi karena terkendala oleh anggaran yang terbatas untuk pemerintahan kecamatan. Kecamatan saat ini lebih fokus pada pendampingan untuk pengembangan pariwisata”*.<sup>125</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Desa Tugurejo sedang merintis pengembangan sektor pariwisata, sementara pariwisata yang dibangun oleh pemerintah kabupaten di Desa Tugurejo sudah berjalan dengan baik”*.<sup>126</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam situs sudah terdapat petilasan yang dilakukan sekedar perawatan, salah satunya dengan memberikan tulisan sehingga pengunjung dapat membaca sendiri. Rumah ndalem sudah ada sejak dulu dan dikelola oleh pihak keluarga dan relawan. Selain itu, dilakukan pembangunan gedung sanggar kebudayaan. Pembangunan Situs Ndalem Pojok dilakukan secara bertahap, karena tidak dialihkan ke pemerintah.*

---

<sup>124</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>125</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>126</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

*Pada tahun 2022, situs ndalem sudah bebas pajak dan telah diakui sebagai cagar budaya sejak tahun 2015”.*<sup>127</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Dana desa yang tersedia belum sebanding dengan potensi sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimiliki masih belum maksimal untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri dalam pengembangan sektor pariwisata. Karena itu, saat ini pemerintah kecamatan memiliki peran penting untuk mengedukasi dan mensosialisasikan potensi wisata di desa agar dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu, diperlukan strategi untuk pengembangan pariwisata. Pemanfaatan potensi wilayah di desa-desa masih kurang sehingga perlu diberikan edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap pariwisata”.*<sup>128</sup>

Bapak Ahmad Farid Arza selaku Sekretaris Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Wisata di Desa Keling dikelola melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan di tingkat desa terdapat Peraturan Desa tentang Wisata. Kebijakan pengelolaan di BUMDES mencakup berbagai unit-unit di wisata, seperti perdagangan, jasa, retribusi, dan sebagainya, serta tata kelola secara keseluruhan di Desa Keling”.*<sup>129</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Berkesinambungan dengan tagline "Kediri Berbudaya", segala kearifan lokal dimanfaatkan menjadi daya tarik utama dalam wisata”.*<sup>130</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pembangunan Goa Jegles sudah berjalan. Destinasi wisata Goa Jegles memanfaatkan kearifan lokal dalam pengembangan destinasi wisata”.*<sup>131</sup>

---

<sup>127</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>128</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>129</sup>Ahmad Farid Arza, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>130</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>131</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Saat ini masa pembenahan pasca pandemi COVID-19. Destinasi wisata mulai berjalan lagi di kepemimpinan kepala desa baru dan sudah berjalan selama satu tahun. Selain itu Desa Keling melaksanakan program dari Bupati Kediri Mas Dhito, yang mewajibkan setiap desa memiliki destinasi wisata. Untuk melaksanakan program tersebut, Desa Keling memanfaatkan kearifan lokal di Goa Jegles sebagai destinasi wisata”*.<sup>132</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Pemanfaatan Situs Ndalem Pojok sebagai tempat wisata kebudayaan, namun potensi wisata masih belum dimaksimalkan karena terlalu fokus pada satu Situs Ndalem Pojok. Diperlukan pengembangan potensi untuk memanfaatkan potensi wisata di desa”*.<sup>133</sup>

## 2. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Pengoordinasian, fasilitasi, dan pemasaran pariwisata, bidang pemasaran pariwisata menyelenggarakan kegiatan gathering atau sosialisasi, di mana admin desa wisata diundang untuk mengikuti pelatihan. Admin desa wisata akan mengikuti kegiatan pelatihan digital marketing yang diselenggarakan satu hingga dua kali setiap tahun”*.<sup>134</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Kegiatan pembinaan langsung ke desa, pihak kecamatan terlibat untuk mendampingi secara langsung dalam setiap tahap kegiatan”*.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>133</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

<sup>134</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>135</sup>Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada "juru pelihara" yang bertugas untuk setiap cagar budaya. Setiap cagar budaya memiliki juru pelihara yang melakukan pemeliharaan secara rutin dan pembinaan dilakukan setiap bulan”*.<sup>136</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Pembinaan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pemasaran destinasi wisata. Pembinaan langsung ke desa dan objek wisata, pihak kecamatan hanya sebatas koordinasi”*.<sup>137</sup>

Bapak Ahmad Farid Arza selaku Sekretaris Desa Keling sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pemerintah Desa Keling memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan digital marketing, yang dilakukan oleh perangkat desa yang menangani terkait pariwisata. Desa juga mendorong untuk berpartisipasi dalam event-event, bahkan Desa Wisata Keling telah mengikuti berbagai event di tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Untuk mendukung pemasaran pariwisata desa memfasilitasi pemuda-pemuda desa untuk menggali potensi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran wisata”*.<sup>138</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pengordinasian, fasilitasi, dan pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berjalan, tetapi belum optimal. Diperlukan pembinaan intensif terutama dalam promosi, karena untuk pemasaran memerlukan tim fotografi atau videografi. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat diperlukan, terutama dalam desa wisata”*.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>137</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>138</sup>Ahmad Farid Arza, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>139</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengordinasian, fasilitasi, dan pembinaan sudah berjalan namun pengelolaan destinasi wisata di Goa Jegles belum optimal. Di Goa Jegles belum ada pengelolaan resmi yang mengatur dan mengelola tempat wisata”*.<sup>140</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berjalan baik, namun pengelolaan di desa belum optimal. Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaannya belum berjalan secara maksimal karena proses penyesuaian dengan program-program baru setelah pergantian pemimpin”*.<sup>141</sup>

### 3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Bidang pemasaran pariwisata menjalin kerjasama dengan “ASITA” untuk melakukan promosi ke Makassar. Pemilihan lokasi di Makassar dilakukan karena Kampung Inggris memiliki Forum Kampung Bahasa (FKB), di mana mayoritas peserta berasal dari Makassar. Selain kegiatan edukasi promosi, tujuannya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan. Selanjutnya, bidang pemasaran pariwisata juga berkolaborasi dengan Perhutani karena tidak memiliki lahan sendiri, seperti pengelolaan di Besuki dan Kelud”*.<sup>142</sup>

Bapak Dheny selaku Staff Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk kerjasama kalau dijabarkan lebih umum dengan pelaku industri pariwisata, pelaku industri pariwisata sendiri terdiri dari banyak pelaku seperti biro perjalanan wisata, asosiasi pariwisata seperti HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) atau bias dikenal pemandu/guide,*

---

<sup>140</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>141</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>142</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

*instansi kepariwisataan, dll. Untuk biro perjalanan sendiri ada beberapa asosiasi yang di antaranya adalah "ASITA"”.<sup>143</sup>*

Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Pihak kecamatan menyambut baik jika pihak desa mengajukan kerjasama, dan perannya sebagai koordinator dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama bidang pemasaran pariwisata”.*<sup>144</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Pemasaran pariwisata dilakukan secara mandiri karena milik pribadi tanpa adanya kontrak atau kerjasama dengan pihak lain”.*<sup>145</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pihak kecamatan memberikan edukasi mengenai potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah selain dari pertanian. Kerjasama pemasaran pariwisata dilakukan langsung oleh pihak desa”.*<sup>146</sup>

Bapak Ahmad Farid Arza selaku Sekretaris Desa Keling sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Balitbangda menjalin kerjasama dengan Desa Keling untuk melakukan simulasi desa wisata. Selain itu, Desa Wisata Keling juga bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang difasilitasi oleh Balitbangda. Tidak hanya dengan pihak pemerintah Desa Wisata Keling juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti jalanin.com dan Kampung Inggris, untuk menyediakan informasi terbaru seputar Desa Wisata Keling”.*<sup>147</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Terdapat forum desa wisata sebagai salah satu dukungan dalam promosi. Jika suatu wisata tidak ditemukan di Desa Keling, dialihkan ke*

---

<sup>143</sup>Dheny, wawancara, (Kediri, 02 Januari 2024)

<sup>144</sup>Ba`do Utama, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>145</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>146</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>147</sup>Ahmad Farid Arza, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*desa lain, dan sebaliknya. Sehingga menciptakan sinergi antar desa, selain itu Desa Wisata Keling juga menitipkan brosur di desa lain sebagai media promosi”*.<sup>148</sup>

#### 4. Pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Tidak terdapat pedoman khusus karena wisatawan langsung mengunjungi destinasi wisata yang dikelola oleh pengelola setempat, sehingga SOP langsung dari masing-masing destinasi wisata. Selain itu, tidak semua wisatawan meminta izin sebelum melakukan kunjungan pariwisata, melainkan langsung menuju ke lokasi destinasi”*.<sup>149</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk penerimaan widyawisata masih belum tersedia pedoman, sehingga perlu pengembangan untuk keberadaan panduan”*.<sup>150</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Belum ada pedoman dan penyelenggaraan pengiriman atau menerima wisatawan yang telah ditetapkan”*.<sup>151</sup>

Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Terdapat pedoman penerimaan wisatawan seperti menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Pedoman diatur oleh desa masing-masing melalui Kelompok Sadar Wisata dan diatur juga oleh pengelola wisata. Meskipun semua desa memiliki Kelompok Sadar Wisata ada yang sudah berjalan dan ada yang belum”*.<sup>152</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>148</sup>M Didin Saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>149</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>150</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>151</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>152</sup>Ba'do Utama, wawancara, (Kediri, 4 Januari 2024).

*“Penerimaan wisatawan memiliki pedoman yang diinformasikan di sekretariat, contohnya harus bersikap sopan dan santun karena Situs Ndalem Pojok termasuk tempat sakral”.*<sup>153</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Terkait pedoman penerimaan wisatawan, tersedia jadwal kegiatan dan himbauan kepada wisatawan sebagai panduan yang membantu dalam perjalanan wisata”.*<sup>154</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Pedoman dalam penerimaan wisatawan berupa panduan bagi pengunjung untuk mengucap salam, menjaga sopan santun, dilarang merokok di dalam goa, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga diri, hati, serta lingkungan di Goa Jegles”.*<sup>155</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pedoman untuk para wisatawan disediakan dalam bentuk banner yang bisa langsung dibaca oleh pengunjung, terdapat beberapa point yang perlu diperhatikan”.*<sup>156</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Di Situs Ndalem Pojok terdapat pedoman wisata yang dapat dibaca pengunjung di sekretariat setelah melengkapi pengisian data pengunjung”.*<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>154</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>155</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>156</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>157</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

5. Promosi dan kerjasama, publikasi dan pelayanan informasi

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Strategi promosi melibatkan berbagai media, seperti sosial media, media massa, radio, koran, baliho, dan website”.*<sup>158</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Promosi misalnya mengikuti event yang diadakan oleh provinsi, event-event tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Kabupaten Kediri secara khusus. Selain itu pihak kecamatan juga memberi dukungan kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam berbagai event yang diadakan di tempat wisata, seperti di Simpang Lima Gumul, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata. Publikasi melalui sosial media kecamatan”.*<sup>159</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Selain Simpang Lima Gumul, di Desa Tugurejo sedang dalam tahap pengembangan dan belum dibuka untuk umum karena terkendala oleh anggaran, karena itu belum dilakukan promosi karena destinasi wisata belum memenuhi kriteria untuk dipublikasikan”.*<sup>160</sup>

Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban dan Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Promosi wisata tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui PKK setiap 3 bulan sekali. Untuk memasarkan pariwisata, pada bulan-bulan tertentu diadakan upacara di mana semua kepala desa diundang untuk mengenalkan destinasi wisata dan ada kegiatan pertunjukan kesenian seperti jaranan dan remong untuk memberikan pengenalan budaya. Selain itu, promosi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan, pengenalan UMKM, dan keikutsertaan berbagai event. Kemudian mengadakan lomba burung atau mancing tujuannya agar*

---

<sup>158</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>159</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>160</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

*masyarakat luar dapat mengetahui lebih banyak tentang wisata di desa”.*<sup>161</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk meningkatkan wisatawan, pengelola dan relawan aktif melakukan pemasaran melalui berbagai platform media sosial, seperti YouTube dan Facebook”.*<sup>162</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pemerintah kecamatan juga melakukan publikasi terkait potensi pariwisata. Kecamatan merasa bangga jika wilayahnya memiliki potensi wisata yang dapat memberikan kontribusi positif kepada desa, sehingga harus dipublikasikan. Kecamatan, sebagai pengelola wilayah, berusaha mengeksplor potensi wisata yang dipamerkan untuk menciptakan citra yang baik”.*<sup>163</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Event-event di Desa Keling menjadi salah satu strategi untuk menarik wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan. Promosi dioptimalkan pada media sosial karena kunjungan dapat meningkat. Upaya promosi melibatkan media sosial desa, akun pribadi, dan pembagian pamflet dalam grup serta kerjasama dengan kampung Inggris, pemilik kursus, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Goa Jegles juga telah dipromosikan melalui banner wisata kabupaten di titik-titik strategis”.*<sup>164</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Promosi destinasi wisata dilakukan melalui media sosial, promosi tambahan dari kegiatan pasar sepuh dan pembelajaran jaranan dan lain-lain”.*<sup>165</sup>

---

<sup>161</sup>Ba`do Utama dan Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>162</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>163</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>164</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>165</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Promosi destinasi wisata dilakukan melalui media sosial, tidak hanya oleh Kelompok Sadar Wisata, tetapi juga melibatkan YouTuber, dan wartawan yang datang untuk membuat konten sehingga bias menjadi media promosi wisata”*.<sup>166</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Promosi Situs Ndalem Pojok dilakukan melalui media sosial, kemudian untuk menjangkau masyarakat sekitar di luar desa Pojok, petunjuk arah dipasang agar masyarakat luar mengetahui kalau terdapat Situs Ndalem Pojok”*.<sup>167</sup>

## 6. Pengembangan sistem informasi

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Bidang pemasaran pariwisata mengembangkan sistem informasi melalui beragam media. Keterlibatan mencakup platform-platform penting seperti sosial media, media massa, saluran radio, dan website”*.<sup>168</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Pengembangan sistem informasi selain melalui media sosial, pihak kecamatan juga mengadakan sosialisasi mengenai wisata sebagai informasi seputar destinasi wisata”*.<sup>169</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>166</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>167</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

<sup>168</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>169</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*“Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata proses pengajuan ke jalanin.com sebagai langkah strategis untuk menyertakan destinasi wisata Desa Keling dalam platform website”*.<sup>170</sup>

## 7. Pelaksanaan *branding* dan penetapan *tagline*

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Kediri Berbudaya” telah diusulkan sebagai tagline baru direncanakan sejak tahun 2022, namun karena situasi pandemi pengenalan tagline baru dilaksanakan pada tahun 2023. Tagline “Kediri Berbudaya” tidak hanya untuk mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memiliki filosofi. Kabupaten Kediri memiliki sejarah kerajaan besar, memiliki warisan budaya yang dapat menjadi daya tarik utama. Konsep “Desa Wisata” yang diperkenalkan menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya berpusat pada wilayah Kabupaten. “Desa Wisata” di Kabupaten Kediri diarahkan untuk menjadi destinasi yang berbasis budaya, yang memiliki keberlanjutan jangka panjang. Eksistensi destinasi wisata diwujudkan melalui pelestarian budaya, seperti praktik menanam dan berkebun, pengelolaan makanan, dan menjadi paket edukasi”*.<sup>171</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan tagline untuk promosi wisata masih terkendala. Tagline “Kediri Berbudaya” baru saja diluncurkan pada peringatan hari jadi ke-1219 untuk pelaksanaannya memerlukan alokasi anggaran yang perlu dipertimbangkan”*.<sup>172</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Penerapan konsep Kediri Berbudaya dimulai dari pemberian kaos Kediri Berbudaya kepada perangkat desa atau kecamatan. Kemudian di tempat-tempat pariwisata diberikan logo papan Kediri Berbudaya untuk pelaksanaan branding pariwisata”*.<sup>173</sup>

Ibu Siti Marwiyah selaku juru pelihara Situs Ndalem Pojok sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>170</sup>M Didin sputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>171</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>172</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>173</sup>Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

*“Pelaksanaan branding dan tagline dalam bentuk papan tulisan Kediri Berbudaya belum terealisasi karena masih menunggu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan”*.<sup>174</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan tagline Kediri Berbudaya belum jadi, dan pelaksanaan branding pariwisata Desa Keling mendapatkan fasilitasi dari Baliitbangda Kabupaten terkait branding dan tagline yang dibuat oleh Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2023, terdapat pendampingan untuk menciptakan branding yang sesuai, yaitu "desa bersejarah". Branding kabupaten "Kediri Berbudaya" diterapkan branding di Desa Keling namun lebih spesifik. Branding Desa Keling berkesinambungan dengan tagline kabupaten yaitu desa yang mengangkat kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Branding tersebut mengacu pada "historical village," karena Desa Keling memiliki berbagai cerita rakyat yang dapat dijadikan daya tarik bagi wisatawan. Branding desa wisata tetap terhubung dengan branding pariwisata kabupaten”*.<sup>175</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan branding dan tagline untuk destinasi wisata belum terlaksana. Tetapi di tempat wisata terdapat banner informasi namun kondisinya mulai rusak akibat musim hujan dan kemarau”*.<sup>176</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaksanaan branding dan tagline dalam bentuk papan tulisan Kediri Berbudaya di Situs Ndalem Pojok belum terealisasi”*.<sup>177</sup>

---

<sup>174</sup>Siti Marwiyah, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>175</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>176</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>177</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

## 8. Pendataan kunjungan

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Bidang pemasaran pariwisata melaksanakan pendataan kunjungan wisatawan dengan menggunakan formulir yang dikirimkan melalui platform WhatsApp admin desa wisata. Pengiriman formulir bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data kunjungan”*.<sup>178</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Data kunjungan wisatawan belum tersedia. Misalnya di Simpang Lima Gumul Dinas Pariwisata mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data kunjungan wisatawan karena pengunjung dapat menikmati fasilitas secara gratis, data tersebut mungkin hanya mencakup jumlah kendaraan yang parkir”*.<sup>179</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Pendataan kunjungan di Simpang Lima Gumul masih belum dilakukan, sehingga belum tersedia data kunjungan untuk saat ini”*.<sup>180</sup>

Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Mengenai jumlah pengunjung yang berkunjung ke destinasi wisata, pendataan kunjungan secara langsung dilakukan oleh pengelola wisata”*.<sup>181</sup>

Ibu Siti Marwiyah selaku juru pelihara Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pendataan kunjungan wisatawan dilakukan di sekretariat, dan hasilnya dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan”*.<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>179</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>180</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>181</sup>Ba`do Utama, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>182</sup>Siti Marwiyah, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Ketua Desa Wisata atau Kelompok Sadar Wisata secara rutin melaporkan data kunjungan wisatawan setiap bulan kepada pihak desa. Data kunjungan wisatawan kemudian diverifikasi oleh pihak desa sebelum dilaporkan kepada Dinas Pariwisata”.*<sup>183</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang datang mengisi data. Data kunjungan kesemua wisatawan termasuk wisatawan dari luar negeri, data yang perlu di isi saat masuk Goa Jegles berupa nama, alamat, dan jumlah pengunjung. Pada saat tahun baru kunjungan mengalami peningkatan”.*<sup>184</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Pengunjung selain masyarakat Desa Keling diharuskan mengisi data kunjungan wisatawan yang mencatat nama dan asal rumah sebagai antisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan”.*<sup>185</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengunjung mengisi data kunjungan wisatawan di sekertariat, sehingga wisatawan sebelum masuk ke Situs Ndalem Pojok harus mengisi data untuk pendataan”.*<sup>186</sup>

## 9. Penyelenggaraan event

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>183</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>184</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>185</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>186</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

*“Bidang pemasaran pariwisata memiliki beberapa event, pertama Pesona Wastra, sebuah event kolaboratif dengan bidang kesenian, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023. Kedua, Launching Destination Branding, secara resmi tagline baru "Kediri Berbudaya" dilaksanakan pada 25 Maret 2023. Ketiga, Direct Promotion di Makassar yang InsyaAllah dilaksanakan tahun depan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kediri”.*<sup>187</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Event tahunan seperti Grebeg Suro, menjadi momen penting kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan dari Goa Jegles hingga punden desa sebagai tradisi kearifan lokal di Desa Keling”.*<sup>188</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk pemasaran pariwisata di Goa Jegles terdapat event-event seperti kegiatan pasar sepuh, belajar jaranan, dan jelajah arung kuno”.*<sup>189</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Event untuk pemasaran pariwisata setiap hari Minggu di Goa Jegles diadakan pertunjukan seni tradisional sebagai kegiatan rutin, tetapi jika ada paket wisata menyesuaikannya dengan permintaan wisatawan”.*<sup>190</sup>

## 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap bulan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten melakukan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Dan destinasi wisata melakukan*

---

<sup>187</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>188</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>189</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>190</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*evaluasi dan pelaporan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten”*.<sup>191</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Desa Keling dipegang oleh Kelompok Sadar Wisata. Pihak desa berkomunikasi secara teratur dengan Kelompok Sadar Wisata, dan desa memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan”*.<sup>192</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelola wisata melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan menyampaikan laporan terlebih dahulu ke Desa sebelum melaporkan ke Dinas Pariwisata”*.<sup>193</sup>

## 11. Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha

Ibu Puspita Dwi selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap bulan, bidang pemasaran pariwisata menjalankan rutinitas administrasi dan tata usaha sebagai bagian operasional bulanan”*.<sup>194</sup>

### 1. Hifdh al-Nafsh

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Konsep pariwisata bertujuan untuk memberikan refresh untuk para wisatawan yang mencari alternatif refreshing dan piknik. Destinasi wisata tidak hanya memberikan kesegaran fisik, tetapi juga mampu menghilangkan kelelahan dan kejenuhan”*.<sup>195</sup>

---

<sup>191</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>192</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>193</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>194</sup>Puspita Dwi, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>195</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk mengelola destinasi wisata penting untuk memperhatikan baik aspek fisik maupun pengalaman emosional pengunjung dengan memastikan kepuasan jiwa dan raga, pengelolaan destinasi wisata”.*<sup>196</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*Dalam pemilihan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wisata, belum sepenuhnya memperhatikan aspek jiwa dan raga.*<sup>197</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Adanya Kelompok Sadar Wisata dan Karang Taruna memberikan pemenuhan secara menyeluruh terhadap kebutuhan jiwa dan raga”.*<sup>198</sup>

Ibu Siti Marwiyah selaku juru pelihara Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Rohani dan jasmani dijaga dengan berdoa secara rutin di situs dilakukan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pada sore hari, sedangkan di pesantren kegiatan doa bersama dilaksanakan setiap hari”.*<sup>199</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Sumber daya pengelola perlu diperhatikan, baik dari segi jiwa maupun raga, karena diperlukan kader-kader wisata untuk mengembangkan suatu objek wisata. Karena kader wisata bertugas memberikan edukasi ke daerah yang memiliki potensi pariwisata”.*<sup>200</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>196</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>197</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>198</sup>Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>199</sup>Siti Marwiyah, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>200</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*“Pariwisata Desa Keling didasarkan pada kearifan lokal. Setiap paket wisata selalu memperhatikan kesejahteraan dan pembinaan secara jiwa dan raga kepada mereka yang terlibat dalam kepariwisataan. Dengan memperhatikan aspek jiwa semangat untuk mengelola wisata tetap terjaga. Pengelola wisata selalu dilibatkan dalam setiap event, meskipun pariwisata belum menjadi pendapatan utama”.*<sup>201</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Sangat penting untuk memperhatikan aspek jiwa dan raga dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga harus seimbang. Misalnya di Goa Jegles diadakan kegiatan sholawatan saat perayaan maulid Nabi”.*<sup>202</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan destinasi wisata juga memperhatikan aspek jiwa dan raga. Setiap hari Minggu pagi diadakan kegiatan senam bersama di Goa Jegles”.*<sup>203</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Situs Ndalem Pojok dikelola dengan memperhatikan aspek jiwa dan raga. Para pengelola memastikan seluruh kegiatan dalam Situs Ndalem Pojok dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat”.*<sup>204</sup>

## 2. Wasilah

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Pariwisata mencakup beragam, misalnya kunjungan ke makam dan masjid. Pariwisata bersifat multi-dimensi, tidak hanya pada pemandangan alam seperti gunung dan sungai, namun juga mencakup wisata religi. Pada wisata religi selalu disertai dengan doa yang*

---

<sup>201</sup>M Didin sputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>202</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>203</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>204</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

*memberikan arah spiritual dan mengarahkan pikiran menuju kehidupan akhirat”.*<sup>205</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan destinasi wisata juga memperhatikan orientasi ke nilai-nilai spiritual dan kehidupan akhirat seperti adanya tempat beribadah”.*<sup>206</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan destinasi wisata diusahakan memasukkan orientasi ke akhirat, karena kebutuhan spiritual juga merupakan aspek penting apabila aspek spiritual tidak terpenuhi menjadi kendala dalam pengelolaan destinasi wisata.”*<sup>207</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap lokasi wisata dengan adanya fasilitas tempat ibadah diarahkan ke nilai spiritual, sehingga para wisatawan untuk melakukan ibadah tanpa perlu meninggalkan area wisata”.*<sup>208</sup>

Bapak Darwanto selaku Kepala Desa Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Orientasi ke akhirat menjadi bagian penting dari Situs Ndalem Pojok. Di situs ini, terdapat Pesantren Kebangsaan yang menjadikan doa lintas agama sebagai bagian dari setiap kegiatan yang diadakan”.*<sup>209</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Ada orientasi ke akhirat, dalam pengelolaan dana kontribusi, selain untuk kebersihan dan perawatan juga dialokasikan untuk kegiatan tasyakuran. Program paket santunan dilaksanakan otomatis ada orientasi ke akhirat”.*<sup>210</sup>

---

<sup>205</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>206</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>207</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>208</sup>Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>209</sup>Darwanto, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>210</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*Ketika orang sedang berwisata seringkali mereka lupa waktu. Sehingga sangat penting untuk menyediakan tempat peribadahan sebagai wujud ungkapan syukur makhluk kepada Tuhan”.*<sup>211</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk orientasi ke akhirat destinasi wisata Desa Keling telah menyediakan fasilitas mushola. Dalam pengelolaan destinasi wisata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pemasaran pariwisata terdapat pengenalan Pondok Pesantren Ringin Agung sebagai salah satu tempat pendidikan keagamaan. Promosi pondok pesantren tua tidak hanya dilakukan untuk menarik wisatawan, tetapi untuk memperkenalkan tempat pendidikan agama kepada masyarakat. Kemudian pengenalan Masjid Tua Ringin Agung yang memiliki usia lebih dari satu abad dengan arsitektur yang masih dipertahankan menjadi bagian dari promosi pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke masjid tidak hanya menikmati keindahan arsitektur, tetapi juga memiliki kesempatan untuk beribadah yang sesuai dengan orientasi ke akhirat”.*<sup>212</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan destinasi wisata ada orientasi ke akhirat. Misalnya di lokasi wisata terdapat mushola. dan masih dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas fasilitas”.*<sup>213</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan destinasi wisata ada orientasi ke akhirat, bagi pengunjung Muslim disediakan mushola. Namun, untuk tempat wudhu saat ini masih gabung di dalam kamar mandi. Akan tetapi, ke depannya ada pembenahan dan perbaikan fasilitas agar lebih baik”.*<sup>214</sup>

---

<sup>211</sup> Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>212</sup> M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>213</sup> M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>214</sup> Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Di Situs Ndalem Pojok orientasi ke arah akhirat, dapat dilihat melalui adanya kegiatan pengajian secara rutin. Selain itu setiap pelaksanaan PHBN juga disertai dengan doa bersama lintas agama”.*<sup>215</sup>

### 3. Hadd al-Kifayah

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap daerah memiliki kearifan lokal atau potensi lokal yang belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan kebutuhan. Namun, berupaya untuk mengarahkan pengelolaan tersebut menuju pembangunan atau pariwisata berkelanjutan. Tujuan utamanya untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat dan memastikan kemanfaatan yang lebih luas dari potensi lokal yang dimiliki”.*<sup>216</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan destinasi wisata diusahakan sesuai dengan kebutuhan, seperti dengan adanya Simpang Lima Gumul telah memberikan manfaat bagi masyarakat, contohnya UMKM dan pedagang kaki lima”.*<sup>217</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam mengelola destinasi wisata di Desa Tugurejo sesuai potensi yang ada, sehingga memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di desa secara maksimal”.*<sup>218</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial dan Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>215</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

<sup>216</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>217</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>218</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

*“Pengembangan potensi wisata sudah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga potensi yang ada dikembangkan secara maksimal”.*<sup>219</sup>

Ibu Irmawati Selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan Situs Ndalem Pojok dilakukan menyesuaikan kebutuhan, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal”.*<sup>220</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan destinasi wisata dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam pengembangan wisata tetap mempertimbangkan kondisi dan tetap memperhatikan keberagaman etniknya”.*<sup>221</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan tempat wisata tidak selalu memerlukan modal besar atau pembangunan yang langsung besar namun memanfaatkan potensi yang sudah ada di sekitar. Misalnya suatu komunitas membutuhkan edukasi gastronomi atau wisata kuliner dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang memiliki keahlian dalam pembuatan kuliner khas seperti sambal betik, nasi tiwul, sego ampok, dan jenang grendul dapat dijadikan sebagai daya tarik dalam edukasi kuliner khas Desa Keling”.*<sup>222</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam mengelola destinasi wisata, pengelola memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan. Potensi-potensi yang sudah ada dikembangkan agar destinasi wisata dapat menarik wisatawan”.*<sup>223</sup>

---

<sup>219</sup> Azwar Anas, dan Ba`do Utama, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>220</sup> Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>221</sup> Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>222</sup> M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>223</sup> M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Goa Jegles memiliki lokasi yang jauh dari pemukiman. Dulu Goa Jegles terbengkalai dan tidak terurus digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kemudian Goa Jegles direnovasi dan dimanfaatkan sebagai tempat wisata sesuai dengan kebutuhan”.*<sup>224</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“pengelolaan destinasi wisata sudah menyesuaikan kebutuhan misalnya pelestarian pohon ikonik di Situs Ndalem Pojok dengan menjaga eksistensinya melalui pengecoran di tengah pohon tersebut”.*<sup>225</sup>

#### 4. Muthabaqoh dan Tawazun

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Tidak hanya berfokus pada pariwisata berkelanjutan, titik beratnya terletak pada pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Tujuannya untuk mencapai kepuasan, menjaga kelestarian, dan menjamin konservasi sumber daya, sehingga dampak positif dapat dirasakan secara berkelanjutan”.*<sup>226</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan destinasi wisata, ekosistem menjadi perhatian utama, seperti membiarkan pohon-pohon besar tetap tumbuh tanpa ditebang, sebagai upaya untuk melestarikan suasana alam yang masih terjaga”.*<sup>227</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>224</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>225</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

<sup>226</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>227</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

*“Keselarasan dan keseimbangan ekosistem menjadi perhatian utama dalam pengembangan potensi wisata, sehingga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi yang berlebihan”.*<sup>228</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial dan Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Keselarasan dan keseimbangan ekosistem sangat diperhatikan, bahkan ditegaskan dengan adanya larangan-larangan yang diinformasikan secara jelas”.*<sup>229</sup>

Bapak Darwanto selaku Kepala Desa Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Upaya menjaga keselarasan dan keseimbangan di destinasi wisata sudah dilakukan dengan baik, termasuk melalui inisiatif gerakan pembersihan di sekitar sungai”.*<sup>230</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan Situs Ndalem Pojok memperhatikan keselarasan dan keseimbangan ekosistem. Pelestarian alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara keberlanjutan pariwisata dan pelestarian lingkungan”.*<sup>231</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pada pengelolaan destinasi wisata, sangat diperhatikan keselarasan dan keseimbangan ekosistem untuk mencapai pengembangan wisata yang berkelanjutan”.*<sup>232</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>228</sup> Sugianto, wawancara, (Kediri, 3 Januari 2024).

<sup>229</sup> Azwar Anas, dan Ba`do Utama, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>230</sup> Darwanto, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>231</sup> Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>232</sup> Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*“Fokus utama wisata Desa Keling di Goa Jegles sehingga sangat menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya sungai yang memiliki fungsi utama sebagai saluran pengairan untuk sawah tetap dipertahankan fungsinya, meskipun di sisi lain dimanfaatkan untuk kegiatan river tubing sebagai sarana pariwisata. Debit air sungai tetap diperhatikan untuk mendukung irigasi pertanian lancar. Kemudian kegiatan normalisasi sungai dengan pembersihan sekitar sungai dan pohon yang tidak produktif lagi dipersiapkan bibit-bibit tanaman yang akan ditanam di sekitar sungai untuk menjaga eksistensi lingkungan. Selain itu larangan penembakan burung dan penangkapan hewan liar yang diatur dalam peraturan desa merupakan salah satu cara untuk menjaga ekosistem agar tetap terjaga”.*<sup>233</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan destinasi wisata keselarasan dan keseimbangan ekosistem di tempat wisata dijaga, misalnya ada kegiatan penghijauan di sekitar Goa Jegles. Di sini, juga tersedia bibit-bibit yang siap ditanam”.*<sup>234</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Keselarasan dan keseimbangan ekosistem di Goa Jegles sangat dijaga, terutama kerusakan yang disebabkan oleh wisatawan. Sehingga terdapat peringatan berupa larangan membawa makanan ke dalam area goa dan merokok. Dengan tujuan untuk melindungi ikan yang ada di goa agar tidak mati karena ulah orang-orang yang membuang putung rokok sembarangan”.*<sup>235</sup>

## 5. Muhtaram

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Sudah jelas dalam keimanan kita, dijelaskan bahwa selain manusia, hewan, dan tumbuhan, terdapat pula makhluk lain seperti yang dijelaskan dalam kitab. Saya meyakini pentingnya memperhatikan eksistensi seluruh makhluk. Namun, dalam memperhatikan eksistensi*

---

<sup>233</sup>M Didin Saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>234</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>235</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

*mahluk non fisik, dilakukan ritual atau bagian dari budaya yang tidak mengarah kepada perbuatan musyrik”.*<sup>236</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi semua makhluk dijaga, seperti menjaga pohon besar dengan tidak menebangnya, melainkan dilestarikan. Di beberapa lokasi Simpang Lima Gumul terdapat pohon mojopahit untuk mengusir roh-roh jahat. Sementara di beberapa tempat mengakui dan menyakralkan tempat-tempat tertentu”.*<sup>237</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk diperhatikan, terutama di Punden Mbah Tugu terkait wisata di Desa Tugurejo, Punden Mbah Tugu memiliki kaitan dengan peninggalan zaman dahulu yang diyakini oleh masyarakat sebagai cikal bakal Desa Tugurejo”.*<sup>238</sup>

Bapak Ba'do Utama selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

*“Penting untuk memperhatikan eksistensi seluruh makhluk di lokasi wisata, dengan prinsip tidak mengganggu. Hewan-hewan seperti monyet dan burung dibiarkan, bahkan terdapat larangan menembak. Selain itu di destinasi wisata Alaska, terdapat ritual pada malam suro yang dilakukan untuk keselamatan dan lain-lain”.*<sup>239</sup>

Bapak Darwanto selaku Kepala Desa Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks lintas agama yang tidak terlepas dari keyakinan dan ibadah masing-masing”.*<sup>240</sup>

Ibu Irmawati selaku relawan Situs Ndalem Pojok sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Seluruh makhluk eksistensinya sangat diperhatikan di Situs Ndalem Pojok, termasuk dalam lintas agama. Setiap pengunjung*

---

<sup>236</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>237</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>238</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>239</sup>Ba`do Utama, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>240</sup>Darwanto, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

*diberikan kebebasan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan prinsip saling menyesuaikan dan saling menghormati antar seluruh makhluk”.*<sup>241</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk diperhatikan, bahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat tetap dijaga dan dilestarikan, misalnya di punden. Di sana, diadakan kegiatan bersih desa atau kegiatan-kegiatan sakral yang dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan”.*<sup>242</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk sangat diperhatikan bias dilihat melalui papan himbauan yang secara tidak langsung mengajak pengunjung untuk menjaga lingkungan. Selain itu menghormati makhluk fisik dan non fisik dengan menjaga kesopanan dan mengucapkan salam. Karena semua makhluk di sekitar kita memberikan imbal balik positif jika diperlakukan dengan baik”.*<sup>243</sup>

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk diperhatikan, salah satunya dengan larangan berburu untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup dan keberagaman di destinasi wisata”.*<sup>244</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk di sekitar wisata Goa Jegles diperhatikan. Contohnya, ayam alas yang ada di sekitar tidak boleh ditangkap. Selain itu, pengunjung dilarang membawa senapan untuk menembak hewan-hewan di sekitar tempat wisata. Dan disini saling menghormati dan kesakralan tetap dijaga dengan baik”.*<sup>245</sup>

---

<sup>241</sup>Irmawati, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>242</sup>Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>243</sup>M Didin saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>244</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>245</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Eksistensi seluruh makhluk diperhatikan bahkan melalui upacara adat, seperti ritual pencucian keris yang dilaksanakan pada satu suro. Ritual tersebut selain sebagai tradisi budaya, tetapi juga menghormati keberadaan makhluk-makhluk spiritual”*.<sup>246</sup>

## 6. Mukallaf

Bapak Sabila Rosad selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri sebagai informan pertama menyatakan sebagai berikut:

*“Orientasi wisata berkelanjutan menjadi fokus utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi, serta berpikir jauh ke depan untuk memastikan keberlanjutan. Pariwisata diarahkan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada. Wisata berkelanjutan, konservasi, pelestarian, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan penguatan pelestarian lingkungan terkait destinasi wisata alam”*.<sup>247</sup>

Bapak Sumarno selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem sebagai informan kedua menyatakan sebagai berikut:

*“Pelestarian lingkungan di destinasi wisata sangat ditekankan, seperti penanaman pohon yang dilakukan setiap tahun dan menjaga keberlanjutan sumber daya seperti penebaran benih ikan”*.<sup>248</sup>

Bapak Sugianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Tugurejo sebagai informan ketiga menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap tahun tersedia anggaran untuk penanaman pohon di Desa Tugurejo. Prioritas utamanya di Punden Mbah Tugu karena area Punden Mbah Tugu cukup luas dan tanamannya masih kurang, sehingga mendapatkan penekanan khusus dalam program penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan”*.<sup>249</sup>

Bapak Azwar Anas selaku PLT Sosial Kecamatan Wates sebagai informan keempat menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>246</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

<sup>247</sup>Sabila Rosad, wawancara, (Kediri, 29 Desember 2023).

<sup>248</sup>Sumarno, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

<sup>249</sup>Sugianto, wawancara, (Kediri, 03 Januari 2024).

*“Memperhatikan pelestarian lingkungan, selain itu terdapat larangan untuk membuat tembok permanen di destinasi wisata. Kemudian setiap 6 bulan dilakukan kegiatan penghijauan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan di lokasi wisata”.*<sup>250</sup>

Bapak Darwanto selaku Kepala Desa Pojok sebagai informan kelima menyatakan sebagai berikut:

*“Pelestarian lingkungan sangat diperhatikan, bahkan ketika ikon pohon kantil mati, tetap dijadikan ikon dengan cara melakukan pengecoran pohon untuk menjaga keberlanjutan simbol tersebut”.*<sup>251</sup>

Ibu Siti Marwiyah selaku juru pelihara Situs Ndalem Pojok sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Pengelolaan Situs Ndalem Pojok sangat memperhatikan pelestarian lingkungan dengan selalu mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Kemudian penanaman pohon diarahkan pada pohon-pohon yang memiliki fungsional”.*<sup>252</sup>

Bapak Agus Joko P selaku Sekretaris Kecamatan Kepung sebagai informan keenam menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam pengembangan potensi wisata pelestarian lingkungan dipastikan dijaga dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Pelestarian lingkungan bersifat berkelanjutan sehingga tidak ada jadwal tertentu untuk kegiatan penanaman pohon, dan masyarakat sekitar ikut berperan seperti dalam penanaman kembali pohon yang mati atau menanam pohon di titik yang rawan longsor, semuanya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan”.*<sup>253</sup>

Bapak M Didin Saputro selaku Penggerak Desa Wisata dan Kasi Pelayanan Desa Keling sebagai informan ketujuh menyatakan sebagai berikut:

*“Upaya pelestarian lingkungan sudah dilakukan misalnya dengan penanaman pohon setelah pembersihan sekitar sungai, membuang sampah pada tempayan, dan persiapan bibit tanaman di sekitar goa untuk ditanam. Menunjukkan upaya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar destinasi wisata”.*<sup>254</sup>

---

<sup>250</sup> Azwar Anas, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>251</sup> Darwanto, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>252</sup> Siti Marwiyah, wawancara, (Kediri, 04 Januari 2024).

<sup>253</sup> Agus Joko P, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>254</sup> M Didin Saputro, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

Bapak M Ali Imron selaku pengelola destinasi wisata Goa Jegles sebagai informan kedelapan menyatakan sebagai berikut:

*“Pelestarian lingkungan sangat dijaga dalam pengelolaan destinasi wisata, karena apabila lingkungan terjaga kesehatan masyarakat pasti terjaga. Pelestarian lingkungan diperhatikan secara serius dalam pengelolaan destinasi wisata”*.<sup>255</sup>

Ibu Sri Wahyuni, Usia 53 Tahun, Alamat RT 13 RW 03 Dusun Keling Desa Keling selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesembilan menyatakan sebagai berikut:

*“Pelestarian lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata sangat diperhatikan untuk menjaga kelestarian alam di sekitar Goa Jegles”*.<sup>256</sup>

Ibu Zulfa Arum Lestari, Usia 22 Tahun, Alamat RT 13 RW 04 Dusun Ngelowan Desa Duwet selaku masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai informan kesepuluh menyatakan sebagai berikut:

*“Perhatian terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan sangat diperhatikan, salah satunya dengan adanya larangan membuang sampah sembarangan di Situs Ndalem Pojok. Selain itu, tersedianya dana khusus untuk pengelolaan kebersihan di Situs Ndalem Pojok menjadi bukti dalam menjaga kelestarian lingkungan”*.<sup>257</sup>

---

<sup>255</sup>M Ali Imron, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>256</sup>Sri Wahyuni, wawancara, (Kediri, 08 Januari 2024).

<sup>257</sup>Zulfa Arum Lestari, wawancara, (Kediri, 09 Januari 2024).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Desi Fitriani  
TTL : Kediri, 04 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ngampel, Selodono, RT-4 RW-2, Kec. Ringinrejo,  
Kabupaten Kediri  
Email : desifitriani.tria@gmail.com  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. 2008 - 2014 : MI Hidayatul Ulum
2. 2014 - 2017 : MTsN Kanigoro
3. 2017 - 2020 : SMAN 6 Kediri
4. 2020 - 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang